



BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG  
RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 64);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN TAHUN 2023.

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 64) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut  
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2023 NOMOR 89

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 89 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI GARUT NOMOR 64 TAHUN 2022  
TENTANG RENCANA KERJA  
DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN  
KABUPATEN GARUT TAHUN 2023

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2023. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Pergeseran pagu antar kegiatan penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
3. Penambahan pagu sub kegiatan karena adanya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dan adanya kejadian bencana alam yang berimbas pada sektor perikanan dan peternakan

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2023, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada peraturan tersebut yang sudah melalui proses tahapan perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 disusun berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 166 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Garut.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.

Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah;  
dan
- e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

### **1.1.1.Keterkaitan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dengan Renja Kementerian Kelautan dan Perikanan**

Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan sesuai dengan Arah kebijakan KKP disusun untuk mencapai misi pembangunan kelautan dan perikanan. Beberapa Kebijakan yang sinergis dengan kebijakan di Kabupaten Garut antara lain:

1. Perluasan wilayah konservasi perairan;
2. penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sumber daya alam perikanan tangkap dan untuk kesejahteraan nelayan;
3. pengembangan perikanan budidaya laut, pesisir, dan pedalaman yang ramah lingkungan dengan komoditas unggulan berorientasi ekspor (udang, lobster, kepiting, dan rumput laut) dan komoditas sesuai kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan;
4. Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berkelanjutan sebagai landasan pemanfaatan dan pengusahaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan; dan
5. Penanganan dan Pengelolaan Sampah Laut dengan program Bulan Cinta Laut.

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tersebut akan diperkuat dengan:

1. Peningkatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan penjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk peningkatan konsumsi domestik dan ekspor;
2. Peningkatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan advanced technology; dan
3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan.

Sasaran Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selaras dengan sasaran renja Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut :

1. Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat
2. Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat
3. Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan
4. Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat
5. Tatakelola sumber daya kelautan dan perikanan bertanggung jawab
6. Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing



7. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif

### **1.1.2. Keterkaitan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dengan Renja Kementerian Pertanian**

Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan yaitu Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hasil Peternakan selaras dengan sasaran Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yaitu :

1. Meningkatnya Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional
3. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
4. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Pertanian

### **1.1.3 Keterkaitan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dengan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat**

Rumusan strategi pembangunan kelautan dan perikanan dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat sejalan dengan Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan yaitu meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan.

Sasaran dan strategi DKPP Provinsi Jawa Barat adalah :

Sasaran 1: Meningkatnya Produksi Serta Nilai Tambah Dan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan.

Strategi:

1. Peningkatan produksi perikanan tangkap wilayah utara dan selatan Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh inovasi teknologi, informasi, dan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap yang kondusif.
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan benih dan induk unggul yang didukung dengan penerapan teknologi budidaya, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif.
3. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan hasil ikan yang didukung oleh inovasi teknologi dan informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas, kuantitas, dan pemasaran produk yang modern untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun internasional.

4. Peningkatan konsumsi ikan Provinsi Jawa Barat yang didukung oleh teknologi dengan membentuk brand, trend, dan kebudayaan sehingga terbentuk kebiasaan dan kebanggaan masyarakat mengkonsumsi produk perikanan.
5. Kerjasama dan kolaborasi antar pihak baik pemerintah, lembaga Pendidikan, kelompok nelayan, kelompok budidaya perikanan dan pihak swasta dibidang produksi, pengolahan, dan pemasaran produk perikanan.
6. Pengembangan Korporasi, pengembangan ini dimaksudkan terjadinya sinergisme antara pengusaha perikanan dan kelautan secara terintegrasi dengan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Dimana korporasi mampu secara terus menerus dapat mendapatkan produk yang berkualitas dengan memberikan harga yang layak dan berkeadilan.

Sasaran 2: Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.

Strategi:

1. Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut yang mengedepankan prinsip kelestarian yang bertanggungjawab melalui riset dan inovasi teknologi.
2. Peningkatan kolaborasi multipihak dalam pengelolaan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara lingkungan pesisir dan laut melalui kepatuhan terhadap aturan dan perizinan.
4. Peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan.
5. Peningkatan inovasi teknologi informasi di bidang kelautan dalam menjaga dan mengawasi perairan laut wilayah Jawa Barat untuk mencegah dan mengurangi terjadinya IUU fishing.

#### **1.1.4.Keterkaitan Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dengan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat**

Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2023 adalah Meningkatnya produksi peternakan dengan strategi :

- 1) Peningkatan populasi dan produksi komoditi ternak
- 2) Peningkatan Status Kesehatan Hewan dan Peningkatan Status Produk Hewan yang ASUH

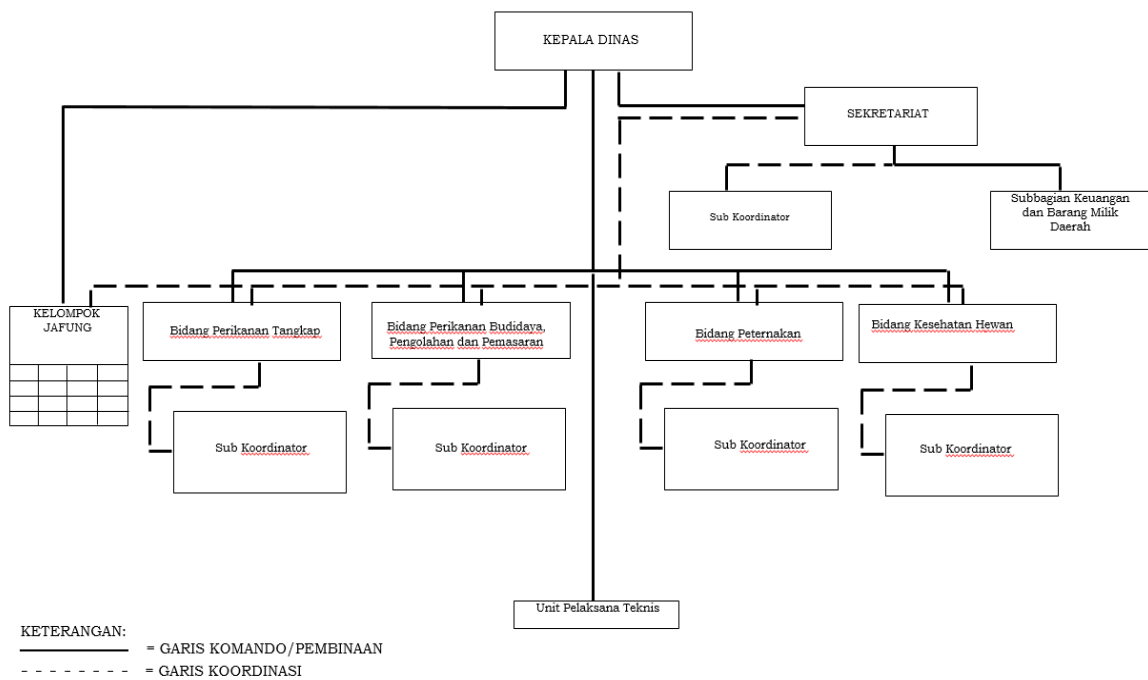
- 3) Meningkatnya penyidikan dan pengujian penyakit hewan dan produk hewan
- 4) Meningkatnya jumlah pelayanan kesehatan hewan
- 5) Peningkatan Kualitas Pakan dan Bahan Pakan Ternak
- 6) Peningkatan produksi susu dan HPT
- 7) Peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan hasil ternak
- 8) Peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan hasil ternak domba dan kambing
- 9) Peningkatan produksi dan produktivitas ternak dan hasil ternak unggas
- 10) Peningkatan kualitas bibit ternak sapi potong
- 11) Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman dan Keterampilan SDM dalam Mengikuti Pelatihan Teknis Sektor Peternakan dan Ketahanan Pangan
- 12) Meningkatnya Kompetensi dan kinerja aparatur

Sasaran dan strategi DKPP Provinsi Jawa Barat terkait dengan sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan yaitu meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan.

## **1.2. Struktur Organisasi dan Jabatan Struktural**

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut. susunan organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris dan empat bidang teknis yaitu (1) Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran, (2) Bidang Perikanan Tangkap, (3) Bidang Kesehatan Hewan; dan (4) Bidang Peternakan. Struktur organisasi Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan terdiri atas :

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan



Sumber : Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021

### 1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut disusun berdasarkan acuan pada ketentuan per undang – undangan yang berlaku sebagai dasar hukum, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

- Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
24. Peraturan Menteri Pertanian No.74/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Pengawasan Obat Hewan;
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/ Permetan/OT.140/5/ 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis;
30. Peraturan Menteri Pertanian No. 100/. Permentan/OT.140/7/2014, tentang Pedoman Pembibitan Sapi. Perah Yang Baik;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 114/Permentan/ PD.410/9/2014 tentang Pematangan Hewan Kurban;
32. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/PK.130/4/2015 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bahan Pakan Asal Hewan Ke dan Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;



33. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/PK.210/8/2015 tentang Pedoman Budidaya Sapi Potong Yang Baik;
34. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/PK.440/8/2015 tentang Pemasukan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;
36. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 dan Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengawasan Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
41. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/PK.020/2/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang Penetapan Kabupaten Garut sebagai Wilayah Sumber Bibit Domba Garut;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

43. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut

- Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
  50. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 235);
  51. Peraturan Bupati Garut Nomor 166 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024;
  52. Peraturan Bupati Garut Nomor 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
  53. Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 36);
  54. Peraturan Bupati Garut Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 64);
  55. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56);

#### **1.4. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya penyesuaian target Renja kinerja Perubahan adalah dan kerangka melakukan pendanaan program/kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2023.

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah:

- a. penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
- b. sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
- c. menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

### **1.1. Sistematika Penulisan**

Renja Perubahan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut tahun 2023, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab. I : Pendahuluan; yang memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan yang berisi tentang tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan RENJA, serta sistematika penulisan.
2. BAB II: Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II; yang berisi Evaluasi pelaksanaan Renja s/d Triwulan II dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat daerah dimana penetapan isu-isu strategis dibuat dengan mempertimbangkan seluruh faktor lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta faktor lingkungan eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman yang dihadapi, Review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
3. Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan; berisi uraian tentang Rangkuman serta Analisis mengenai dasar atau penyebab perubahan rencana kerja dan pendanaan pada setiap program kegiatan yang mengalami perubahan, Uraian perubahan rencana kerja dan pendanaan yang meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan
4. Bab IV : Penutup. Merupakan ringkasan atau kesimpulan dari seluruh dokumen yang disusun yang terdiri dari Catatan Penting dalam rangka pelaksanaan dan ketersediaannya jika tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN 2**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan 2**

Pada Tahun 2023, Dinas Perikanan dan Peternakan melaksanakan 9 program, 22 Kegiatan dan 37 Sub kegiatan. Anggaran Belanja pada Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2023 sebesar Rp. 40,703,315,906,- Pada Triwulan II tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 7,995,673,032,- atau sebesar 19,64 %.

Adapun Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Dari 9 (sembilan) program yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut. Pada Tahun 2023, seluruh Program tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dari total anggaran sebesar Rp. 12.807.202.311,- realisasi sebesar Rp. 6.589.929.282 ,- atau 51.45 %.
- 2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, dari total anggaran sebesar Rp. 7.375.741.900,- realisasi sebesar Rp. 224.105.450,- atau 3.04 %.
- 3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dari total anggaran sebesar Rp. 7,917,688,400,- realisasi sebesar Rp. 127,671,700,- atau 1.61 %.
- 4) Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, dari total anggaran sebesar Rp. 152.760.600,- realisasi sebesar Rp. 6.469.800,- atau 4.24 %.
- 5) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, dari total anggaran sebesar Rp. 1.518.194.740,- realisasi sebesar Rp. 111.491.900,- atau 7.34 %.

- 6) Program Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dari total anggaran sebesar Rp. 3,123,659,280,- realisasi sebesar Rp. 185,588,200,- atau 5.94 %.
- 7) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dari total anggaran sebesar Rp. 6,414,219,675,- realisasi sebesar Rp. 218,495,500,- atau 3.41 %.
- 8) Program Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dari total anggaran sebesar Rp. 1,393,849,000,- realisasi sebesar Rp. 531,921,200,- atau 38.16 %.

Belum tercapainya realisasi anggaran pada Triwulan II yang secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
2. Penjadwalan kegiatan atau sub kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kurang tepat, sehingga perlu mengubah anggaran kas dan surat penyediaan dana (SPD).
3. Kegiatan fisik menunggu selesainya kegiatan perencanaan atau detail engineering design (DED). Hal ini kerap mengakibatkan beberapa kegiatan kontraktual belum dapat dilaksanakan termasuk kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
4. Pengadaan barang/jasa belum mengajukan permohonan pembayaran atas penyelesaian fisik sesuai dengan termin yang diatur dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga

Implikasi yang timbul akibat kondisi di atas tidak tercapainya target sasaran yang telah ditetapkan, maka tindakan yang dilakukan adalah mempercepat pelaksanaan pengadaan sedangkan bagi kegiatan yang akan dilakukan perubahan maka dilakukan Perubahan Renja Tahun 2023 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2023, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Garut Tahun 2023.

Tabel 2.1.

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pekerjaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Triwulan 2 Tahun 2023

No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2024 (akhir periode Renstra PD kabupaten/kota)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun Berjalan (Tahun 2023) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah kabupaten yang dievaluasi 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d Tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah kabupaten s/d tahun 2024 (%)	
									I		II									
									K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1	3	4	5		6		7		8		9		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100	
	Usuran Pemerintahan Pilihan																			
	Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemenuhan kinerja pelayanan SKPD	100	%	54,835,000	100	100	13,350,521	25	3,279,056	25	3,310,873	50	6,589,929	50	49	150	6,589,929	150	12
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya kinerja SAKIP SKPD	100	%	631,000	100	100	639,753	25	30,055	25	22,971	50	53,026	50	8	150	53,026	150	8
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7	36,099		15,594		6,545	-	22,139	-	61				
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5	603,654	1	14,461	1	16,426	2	30,887	40	5				
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya administasi keuangan perangkat daerah	12	Bulan	46,394,000		100	11,212,500	25	2,981,586	25	2,686,980	50	5,668,566	50	51	50	5,668,566	417	12
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					110	11,192,502	3	2,976,637	3	2,683,173	6	5,659,811	5	51				

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					14	19,998	4	4,949	4	3,807	8	8,756	57	44				
	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>60</b>	<b>bulan</b>	<b>2,018,000</b>		<b>100</b>	<b>401,770</b>	<b>25</b>	<b>208,773</b>	<b>25</b>	<b>85,211</b>	<b>50</b>	<b>293,984</b>	<b>50</b>	<b>73</b>	<b>50</b>	<b>293,984</b>	<b>83</b>	<b>15</b>
	Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2	12,186	1	4,645	1	3,962	2		100					
	Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					11	154,931		148,057		2,666	-	150,723	-	97				
	Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					5	21,181		9,433		2,544	-	11,977	-	57				
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					12	18,833	3	4,358	3	4,358	6	8,716	50	46				
	Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu					12	52,090	3	6,257	3	15,325	6	21,582	50	41				
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					12	142,550	3	36,024	3	56,356	6	92,380	50	65				
	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Pengadaan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>37</b>	<b>unit</b>	<b>2,769,000</b>		<b>15</b>	<b>593,666</b>				<b>391,670</b>	<b>-</b>	<b>391,670</b>	<b>-</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>391,670</b>	<b>-</b>	<b>14</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					27	168,043				1,880	-	1,880	-	1				
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					2	425,623				389,790	-	389,790	-	92				
	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang pelayanan kantor</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>1,412,000</b>		<b>12</b>	<b>409,130</b>	<b>3</b>	<b>48,738</b>	<b>3</b>	<b>108,939</b>	<b>6</b>	<b>157,677</b>	<b>50</b>	<b>39</b>	<b>6</b>	<b>157,677</b>	<b>10</b>	<b>11</b>



	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						12	103,577	3	30,510	3	31,611	6	62,121	50	60				
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						2	305,553		18,228		77,328	-	95,556	-	31				
	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang pelayanan kantor</b>	<b>60</b>	<b>Bulan</b>	<b>1,551,000</b>			<b>12</b>	<b>93,702</b>	<b>3</b>	<b>9,904</b>	<b>3</b>	<b>15,102</b>	<b>6</b>	<b>25,006</b>	<b>50</b>	<b>27</b>	<b>6</b>	<b>25,006</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						110	93,702	25	9,904	25	15,102	50	25,006	45	27				
	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>Prosentase Produksi perikanan tangkap</b>	<b>5</b>	<b>%</b>	<b>13,840,000</b>			<b>1</b>	<b>7,375,742</b>	<b>0</b>	<b>99,327</b>	<b>0</b>	<b>124,779</b>	<b>1</b>	<b>224,105</b>	<b>50</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>224,105</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Lokasi Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>7</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>5,016,000</b>			<b>6</b>	<b>6,648,605</b>		<b>78,840</b>		<b>30,886</b>	<b>-</b>	<b>109,725</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>109,725</b>	<b>-</b>	<b>1,567,505</b>
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia						5	6,232,595				-	-	-	-	-				
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia						10	416,010		78,840		30,886	-	109,725	-	26	-			
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan kemampuan usaha nelayan dan masyarakat pesisir</b>	<b>7</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>6,742,000</b>			<b>6</b>	<b>672,537</b>		<b>14,752</b>		<b>90,008</b>	<b>-</b>	<b>104,760</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>104,760</b>	<b>-</b>	<b>1,496,573</b>
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya						5	601,998		11,681		31,513	-	43,193	-	7	-			
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha						7	70,539		3,072		58,495	-	61,567	-	87	-			

	<b>Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	5	Unit	2,579,000			5	54,600		5,735		3,885	-	9,620	-	18	-	9,620	-	192,400
	Sub kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						1	54,600		5,735		3,885	-	9,620	-	18	-			
	<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>	1	%	11,966,000			1	7,612,167	0	66,620	0	59,998	1	126,618	50	2	1	126,618	50	12,661,770
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil</b>	<b>Meningkatnya produktivitas kelompok pembudidaya ikan</b>	15	Kelompok	1,550,000			1	770,754	0	10,220	0	29,112	1	39,332	50	5	1	39,332	3	262,214
	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas						7	770,754		10,220		29,112	-	39,332	-	5				
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan</b>	<b>Peningkatan dan Penjaminan ketersediaan sarana prasarana budidaya perikanan seta promosi hasil perikanan</b>	60	Bulan	10,416,000			12	6,841,414	3	56,400	3	30,886	6	87,286	50	1	6	87,286	10	145,476
	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						8	1,501,414		56,400		-	-	56,400	-	4				
	Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						118	5,340,000				30,886	-	30,886	-	1	-			
	<b>Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>Lokasi Pengawasan sumberdaya Kelautan</b>	6	Kecamatan	759,000			6	152,761	6	2,154	6	2,154	12	4,308	200	3	12	4,308	200	71,793
	<b>Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>Pembinaan dan Bantuan Sarana Prasarana Patroli Pengawasan Pokmaswa</b>	6	Kelompok	759,000			5	152,761	5	2,154	5	2,154	10	4,308	200	3	10	4,308	167	71,793

	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			759,000			1	152,761	30	2,154	30	2,154	60	4,308	6,000	3	60			
	<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan</b>	<b>15</b>	<b>%</b>	<b>4,487,000</b>			<b>3</b>	<b>1,518,195</b>	<b>1</b>	<b>16,117</b>	<b>1</b>	<b>95,375</b>	<b>2</b>	<b>111,492</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>111,492</b>	<b>10</b>	<b>743,279</b>
	<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah unit sarana pemasaran terbangun</b>	<b>3</b>	<b>Unit</b>									<b>95,375</b>								
	Sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						5	218,195		16,117		95,375								
	Sub kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi						2	1,300,000				-								
	<b>Bidang Urusan Pertanian</b>										<b>42,952</b>		<b>135,216</b>								
	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>Persentasi produksi hasil peternakan</b>	<b>15</b>	<b>%</b>	<b>35,220</b>			<b>3</b>	<b>3,043,424</b>	<b>4</b>	<b>42,952</b>	<b>4</b>	<b>135,216</b>	<b>8</b>	<b>178,168</b>	<b>250</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>178,168</b>	<b>50</b>	<b>1,187,788</b>
	<b>Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) komoditas peternakan</b>	<b>10</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>4,856,000</b>			<b>10</b>	<b>242,684</b>		<b>13,551</b>		<b>128,106</b>	<b>-</b>	<b>141,657</b>	<b>-</b>	<b>58</b>	<b>-</b>	<b>141,657</b>	<b>-</b>	<b>1,416,570</b>
	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman						1	116,466	-	6,906	-	33,526	-	40,432	-	35				
	Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman						1	126,219		6,645		94,580	-	101,225	-	80				

	<b>Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Bibit ternak dan HPT</b>	<b>60</b>	<b>Kali</b>				<b>12</b>	<b>80,235</b>	<b>3</b>	<b>1,580</b>	<b>3</b>	<b>5,840</b>								
	Sub kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	25	Ton				5	80,235		1,580		5,840								
	<b>Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>Meningkatnya populasi ternak dalam daerah</b>	<b>15</b>	<b>Kelompok</b>	<b>31,434</b>			<b>1</b>	<b>2,800,740</b>	<b>0</b>	<b>29,401</b>	<b>0</b>	<b>7,110</b>	<b>1</b>	<b>36,511</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>36,511</b>	<b>3</b>	<b>243,408</b>
	Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	#####	Ekor				3,088	2,800,740		29,401		7,110	-	36,511	-	1				
	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Prasarana yang dibangun/ dikembangkan</b>	<b>75</b>	<b>%</b>	<b>14,386,000</b>			<b>10</b>	<b>6,414,220</b>		<b>13,387</b>		<b>205,109</b>	<b>-</b>	<b>218,496</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>218,496</b>	<b>-</b>	<b>291,327</b>
	<b>Kegiatan 'Pembangunan Sarana Pertanian</b>	<b>Peningkatan prasarana pertanian dan pendukung usaha peternakan dan pembibitan ternak</b>	<b>11</b>	<b>Unit</b>	<b>4,786,000</b>			<b>7</b>	<b>2,785,053</b>		<b>8,257</b>		<b>570</b>	<b>-</b>	<b>8,827</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8,827</b>	<b>-</b>	<b>80,241</b>
	Sub Kegiatan Pembangunan.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara						1	94,949		8,257		570	-	8,827	-	9				
	Sub Kegiatan Pembangunan.Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara						1	2,690,104				-	-	-	-					
	<b>Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun Galur /Ternak dalam kabupaten/Kota</b>	<b>Unit kawasan yang dibangun</b>	<b>5</b>	<b>Lokasi</b>	<b>10,180</b>			<b>2</b>	<b>3,629,167</b>		<b>5,130</b>		<b>204,539</b>	<b>-</b>	<b>209,669</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>209,669</b>	<b>-</b>	<b>4,193,380</b>
	Sub Kegiatan Pelestarian Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1	Lokasi				1	3,629,167		5,130		204,539	-	209,669	-	6				

	<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit ternak	5	%	3,648,000			5	1,393,849	1	101,566	1	430,355	3	531,921	50	38	3	531,921	50	10,638,424
	<b>Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pelayanan kesehatan hewan melalui vaksinasi dan pengobatan penyakit ternak	42	Kecamatan	402,000			42	77,700		43,295		5,200	-	48,495	-	62	-	48,495	-	115,464
	Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	60	Laporan				12	77,700	3	43,295	3	5,200	6	48,495	50	62				
	<b>Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Lokasi Pemeriksaan, pengawasan dan pendataan penyakit hewan dan keamanan produk hewan	60	Bulan	342,000			42	44,194	14	9,774	14	11,570	28	21,344	67	48	28	21,344	47	35,573
	Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	20	Laporan				4	44,194	1	9,774	1	11,570	2	21,344	50	48				
	<b>Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	Pelayanan medik veteriner	7	Unit	2,602,000			12	1,010,162	3	36,257	3	289,273	6	325,530	50	32	6	325,530	86	28,833
	sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	60	laporan				12	1,010,162	3	36,257	3	289,273	6	325,530	50	32				
	<b>Kegiatan Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	Jumlah Pengawasan PAH dalam satu tahun	60	Kali	302,000			12	261,793	3	12,241	3	124,313	6	136,553	50	52	6	136,553	10	227,588
	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	20	laporan				4	261,793	1	12,241	1	124,313	2	136,553	50	52	2	136,553		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																<b>78</b>	<b>12</b>			<b>58</b>	<b>2,843,822</b>

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Triwulan 2 Tahun 2023

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

### **2.2.1. Pencapaian Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA), IKU dan dokumen Perjanjian Kinerja, Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2023 menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah komoditas perikanan;
2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah komoditas peternakan

Sesuai dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan target dan capaian kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah komoditas perikanan

Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan terdiri dari Sembilan indikator yaitu (1) Jumlah produksi perikanan budidaya, (2) jumlah produksi perikanan tangkap, dan (3) produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan .

Hasil dari tiga indikator tersebut rata-rata mencapai sasaran sebesar 117,77 % dengan kriteria “Baik”. Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 2.2.

2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah komoditas peternakan

Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil peternakan terdiri dari tiga indikator yaitu (1)Produksi Hasil Peternakan ( produksi daging, produksi telur, produksi susu ) dan (2) produksi olahan hasil peternakan pada kelompok peternak binaan; dan (3) Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan (%). Capaian rata-rata mencapai sasaran sebesar 101,90 % kriteria “**Baik**”. Pencapaian indikator tersebut sebagaimana disajikan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
<b>Indikator Sasaran 1</b>												
1.	Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)			64.368	65,012.00	65,662.00	66,318	64.218.58	65.910	65,662.00	66,318	
2.	Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)			1.454	1,461	1,468	1,475	2.101.26	2023	1,468	1,475	
3.	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (Ton)			765	743	765	788	863.9	828,5	765	788	
<b>Indikator Sasaran 2</b>												
4.	Produksi hasil Peternakan (Daging, Susu dan Telur) (Ton)			36,259	37,346	38,467	39,623	42.774,99	31056	38,467	39,623	

5.	Produksi olahan hasil peternakan pada kelompok binaan (ton)			864	881.00	898	918	789	760	898	918	
6.	Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan			5	5	5	5	5	3	5	5	

*Sumber : Laporan Evaluasi Renja Dinas Perikanan dan Peternakan Triwulan 2 Tahun 2023*



Hasil pencapaian kinerja sasaran sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran 1: Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan**

Sasaran 1 terdiri dari Tiga indikator yaitu (1) Jumlah produksi perikanan budidaya, (2) Jumlah produksi perikanan tangkap, dan (3) Jumlah produksi olahan hasil perikanan pada kelompok binaan,

Pencapaian indikator tersebut disajikan berikut ini

**a. Indikator Kinerja 1: Produksi Perikanan Budidaya**

Pada tahun 2023, capaian indikator jumlah produksi perikanan budidaya sampai dengan triwulan 2 mencapai 29.125,05 ton atau sekira 49,7 % dari target tahun 2023. Produksi tersebut berasal dari perikanan budidaya kolam air tenang, kolam air deras, budidaya sawah atau minapadi dan budidaya tambak.

Kendala tidak tercapainya target pada triwulan 2 pada produksi perikanan budidaya diantaranya antara lain pengetahuan petani dan nelayan akan teknologi budidaya masih rendah, misalnya dalam pemilihan induk ikan, pemijahan, penetasan, pembuahan, pemeliharaan larva, pendederan, dan pembesaran. Tenaga penyuluh perikanan masih kurang sehingga inovasi teknologi sulit ditingkatkan. Berkaitan dengan penggunaan lahan, antara usaha budidaya perikanan dengan kegiatan pembangunan lainnya seperti permukiman, industri, dan pertambangan sering merugikan usaha budidaya perikanan. Kualitas air memburuk, khususnya di kawasan padat penduduk dan di kawasan yang tingkat intensitas pembangunannya tinggi. Kegiatan industri, pertanian, dan rumah tangga sering membuang limbah alam tanpa memperhatikan ambang batas baku mutu air buangan limbah sehingga memperburuk kualitas air untuk budi daya ikan

Faktor pendukung yang perlu didorong dalam keberhasilan pencapaian kinerja diantaranya adalah (1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat pembudidaya ikan dalam teknis budidaya, (2) peningkatan pembinaan dan pendampingan aparatur pemerintah terhadap masyarakat dalam pengelolaan usaha budidaya perikanan, (3) Upaya peningkatan

sistem pengelolaan sejumlah kelompok pembudidaya ikan dari sistem tradisional menjadi sistem semi-intensif dan intensif.

**b. Indikator Kinerja 2: Produksi Perikanan Tangkap**

Pada tahun 2023 Hasil produksi perikanan tangkap Kabupaten Garut mencapai 668,56 ton atau sebesar 46,68 %. Produksi perikanan tangkap tersebut berasal dari produksi perikanan laut sebesar 90% dan sisanya dari produksi perikanan perairan umum seperti danau, sungai, rawa dan sebagainya. Apabila dibandingkan dengan target Target sampai dengan triwulan 2 produksi perikanan tangkap ini tidak mencapai target.

Kendala yang dihadapi nelayan pada triwulan 2 adalah cuaca yang tidak menentu yang menyebabkan hasil tangkapan berkurang. Selain itu penyebab menurunnya hasil tangkapan ikan secara garis besar dikarenakan adanya tekanan berupa indikasi penurunan kualitas penangkapan lebih dan pola penangkapan ikan yang tidak mngindahkan batas aman tangkapan nelayan

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang pencapaian kinerja produksi perikanan tangkap diantaranya melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap melalui (1) kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap, (2) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap, (3) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 'Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil, (4) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 'Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan 'Pembiayaan, Kemitraan Usaha

**c. Indikator Kinerja 3: Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan**

Untuk melihat sejauhmana nilai tambah yang dirasakan pembudidaya ikan dan nelayan dari hasil produksi perikanan, maka dilakukan analisis terhadap peningkatan produksi hasil perikanan. Data produksi ini terutama berasal dari survei terhadap kelompok pembudidaya ikan dan nelayan yang berada dalam lingkup binaan Dinas Perikanan dan Peternakan.

Produksi olahan hasil perikanan triwulan 2 Tahun 2023 mencapai 410.68 ton atau sebesar 52,11 %. Bila dibandingkan dengan target sampai dengan triwulan 2 maka indikator ini melebihi target.

Program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja peningkatan produksi olahan hasil perikanan dilaksanakan melalui Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Diantaranya melalui pelaksanaan kegiatan (1) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil , (2) Kegiatan Penyediaan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan pelatihan dan pembinaan pada kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, sub kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk menjamin ketersediaan bahan baku, dilakukan upaya peningkatan produksi perikanan melalui Program Pengelolaan Perikanan Budidaya melalui (1) Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil, sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil, (2) Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan, sub kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Sasaran 2. Meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil peternakan terdiri dari tiga indikator yaitu (1) Produksi Hasil peternakan ( produksi daging, produksi telur, produksi susu ) dan (2) produksi olahan hasil peternakan pada kelompok peternak binaan; dan (3) Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan (%).

Rincian penjelasan pencapaian kinerja disajikan sebagai berikut:

a. Indikator 1: Produksi Hasil Peternakan (Daging, Susu dan telur)

Produksi Hasil peternakan berupa daging, susu dan telur yang dihitung berdasarkan laporan dari UPT baik UPT Kabupaten maupun UPT Wilayah. Produksi daging dihitung berdasarkan laporan pemotongan ternak dari Rumah Potong Hewan (RPH) serta Rumah Potong Unggas (RPU) ditambah dari laporan dari tempat pemotongan di luar RPH/RPU.

Pada Triwulan 2 tahun 2023, Produksi hasil peternakan 17.054.88 Ton atau sebesar 43,04 % dari target tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan target sampai dengan triwulan 2 tahun 2023 produksi produksi hasil peternakan tidak menapai target.

Penurunan produksi ternak sudah dirasakan semenjak 2 tahun terakhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan produksi hasil peternakan adanya penurunan produksi, pola pemeliharaan yang kurang baik, kurangnya investasi pada ternak ayam. Pola perkawinan pada ternak sapi perah yang dapat menurunkan produksi susu.

Dukungan anggaran melalui 2 program yaitu Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian serta penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian belum mampu untuk mendongkrak ketercapaian produksi hasil peternakan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah penambahan populasi ternak sapi dan kerbau serta domba melalui inseminasi buatan. Selain mendapat dukungan dari APBD Kabupaten Garut kegiatan ini juga mendapat dukungan dari APBN melalui program Sikomandan (Sapi Kerbau Induk Andalan Negeri)

b. Indikator 2: Produksi Olahan Hasil Peternakan

Pada triwulan 2 tahun 2023, Produksi olahan hasil peternakan pada kelompok binaan Dinas Perikanan dan Peternakan mencapai 492.8 ton atau tercapai sebesar 53,68. % dari target yang ditetapkan dan bila dibandingkan dengan target sampai dengan triwulan 2 indikator ini melampau target.

Produk olahan hasil peternakan terutama masih didominasi produk kulit yang digunakan untuk membuat produk fashion dan produk makanan, produk telur asin, olahan bakso dan olahan susu.

c. Indikator 3: Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan

Indikator Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan merupakan indikator dari tingkat pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diselenggarakan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Indikator ini pada tahun 2020 dan 2021 mencapai target 100%. Ini artinya pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diselenggarakan Dinas Perikanan dan Peternakan telah mencapai target sesuai harapan. Pada tahun 2022 capaian indikator ini mengalami penurunan yaitu sebesar 60 %. Penurunan capaian indikator ini karena adanya wabah PMK pada awal tahun 2022 dan sampai dengan triwulan 2 mencapai 2 % sehingga apabila dibandingkan dengan target sampai dengan triwulan 2 mencapai 100 %.

### **2.2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan yang efektif dapat memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan dan pemanfaatan

sumber daya alam serta memperdalam kepercayaan masyarakat pada pemerintahan dan administrasi publik.

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimana hasil penyusunan IKM ini merupakan tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu IKM dapat menjadi bahan evaluasi terhadap unsur pelayanan yang masih perlu diperbaiki dan menjadi pendorong setiap penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Penilaian IKM diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Untuk mengukur Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) maka Dinas Perikanan dan Peternakan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 16 Tahun 2014 Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat yang dilakukan di lingkungan Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Garut. Ada sembilan pelayanan di lingkungan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut yang disurvei langsung ke masyarakat yaitu:

1. Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH);
2. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan
3. Pelayanan Pembibitan dan Inseminasi Buatan
4. Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Hewan
5. Pelayanan Pematangan Hewan

6. Pelayanan Penyediaan Benih/Bibit Ikan Unggul

7. Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Ikan

8. Pelayanan Pelelangan Ikan

Survei dilaksanakan semester 1 Tahun 2023. Hasil kuisioner dari seluruh responden dimasukkan dalam aplikasi Sistem Evaluasi Pelayanan Publik Dinas Perikanan dan Peternakan untuk dianalisis.

Berdasarkan Hasil survei dari Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, nilai IKM masing-masing pelayanan mengalami fluktuasi, Perkembangan nilai IKM setiap tahunnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Perkembangan Nilai IKM untuk Pelayanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan

No	Jenis Pelayanan	Tahun							
		2020		2021		2022		2023	
		Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Nilai IKM	Mutu Pelayanan
1	Pelayanan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	78	B	94	A	78	B	79	B
2	Pelayanan Pemotongan Hewan	78,75	B	77	B	76,75	B	76,5	B
3	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan	93	A	87,5	B	87,75	B	92	A
4	Pelayanan Pembibitan Ternak dan IB	83,75	B	87,25	B	88,75	B	86,75	B
5	Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Hewan	73,5	C	70,25	C	79,25	B	78,25	B
6	Pelayanan Izin Penggunaan Fasilitas Pasar Ikan	79,25	B	75,5	C			75	C
7	Pelayanan Penyediaan Benih Ikan Unggul	78,25	B	77,5	B	76,75	B	79,25	B
8	Pelayanan Pelelangan ikan	81,5	A	77,75	B	76,75	B	77,25	B

*Sumber : Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Dinas Perikanan dan Peternakan Semester 1 Tahun 2023*

Dinas Perikanan dan Peternakan mendapatkan skor rata-rata sebesar 80,5 dengan kategori “BAIK”. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 81,09 , terdapat penurunan sebesar 0,59 poin

Walaupun mendapatkan nilai akhir dengan persepsi kategori BAIK dan SANGAT BAIK dari masyarakat, ada pelayanan yang mengalami penurunan indek kepuasan masyarakat seperti pelayanan pemotongan ternak, pelayan inseminasi buatan, fasilitasi izin poenggunaan pasar hewan, fasilitasi penggunaan izin pasar ikan oleh karena itu masih banyak hal yang perlu ditingkatkan agar kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan semakin baik di masa yang akan datang. diantaranya adalah:

1. Perlu upaya peningkatan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui pemberian pembinaan dan pelatihan pelayanan prima.
2. Perlu ditingkatkannya kepatuhan petugas terhadap Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
3. Perlu dilaksanakannya sosialisasi terhadap masyarakat terkait SP dan SOP di unit pelayanan sehingga masyarakat memahami prosedur yang harus dilakukan ketika memerlukan pelayanan dari petugas.
4. Perlu ditingkatkannya sarana dan prasarana penunjang dari tiap unit pelayanan dalam rangka meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas SKPD**

#### **2.3.1 Permasalahan Sektor Peternakan**

Lingkup kerja bidang peternakan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Garut yang terdiri dari 42 kecamatan. Pembangunan bidang peternakan masih tetap ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak serta memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai usaha



tersebut adalah dengan mengutamakan penggunaan potensi lokal dan teknologi tepat guna.

Dalam pelaksanaan pembangunan, kegiatan pembangunan bidang Peternakan dibantu oleh 8 UPT wilayah Kecamatan serta 3 UPT Kabupaten yang terdiri dari UPT Rumah Potong Hewan sebanyak 2 unit (RPH Tarogong dan Wanaraja), UPT Pasar Hewan sebanyak 2 unit (Pasar Hewan Bayongbong dan Wanaraja) dan UPT Pusat Kesehatan Hewan sebanyak 5 unit.

Selain terkait dengan pemenuhan pangan, bidang peternakan juga memiliki tugas dalam meningkatnya pengetahuan dan peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Program yang dilaksanakan diantaranya dengan mendorong pola hidup bersih dan sehat, meningkatkan pemetaan dan pengawasan penyakit hewan menular dan zoonosis serta meningkatkan rasa aman masyarakat terhadap konsumsi Bahan Asal Hewan (BAH) yang memenuhi syarat kesehatan.

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan bidang peternakan selama ini antara lain :

1. Usaha peternakan belum mengutamakan pada skala usaha ekonomis.
2. Tingkat pengetahuan dan keterampilan peternak belum optimal.
3. Ketersediaan sumber pakan hijauan belum dikelola secara intensif dan terpadu
4. Kelembagaan kelompok peternak belum optimal
5. Masih rendahnya akses permodalan ditingkat kelompok peternak,
6. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan/ternak menular.
7. Jumlah petugas teknis di lapangan masih kurang.

### **2.3.2. Permasalahan Sektor Perikanan**

Pembangunan bidang perikanan ditujukan untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan potensi lahan Perikanan melalui penerapan teknologi tepat guna. Meningkatkan produktivitas perikanan baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan gizi masyarakat maupun untuk meningkatkan devisa negara melalui pengembangan komoditi ekspor; meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani ikan

dan nelayan, memperluas kesempatan kerja dan berusaha, serta memelihara kelestarian sumber hayati perikanan dan ekosistem perairan.

Lingkup kerja bidang perikanan meliputi seluruh wilayah Kabupaten Garut yang terdiri dari 42 kecamatan. Dalam pelaksanaan pembangunan, Bidang Perikanan dibantu oleh 8 UPT Wilayah dan 2 UPT Kabupaten yang terdiri dari UPTD Perikanan Budidaya (Balai Benih Ikan dan Pasar Ikan) dan UPT Tempat Pelelangan Ikan.

Beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan perikanan selama ini adalah sebagai berikut :

1. Usaha perikanan masih dikelola sebagai usaha tani sampingan
2. Potensi lahan Perikanan dalam kegiatan instenfikasi budidaya mina padi belum dikelola secara optimal
3. Terjadinya alih fungsi kepentingan penggunaan lahan yang menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas perairan
4. Kelembagaan kelompok pembudidaya ikan dan nelayan belum optimal dan masih rendahnya akses teknologi dan inovasi
5. Masih sering terjadinya alih fungsi kepentingan penggunaan lahan sepadan pantai
6. Terjadinya kerusakan ekosistem laut
7. Pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut belum optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan

### **2.3.3. Permasalahan Internal**

Identifikasi permasalahan internal dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi positif dan negatif dari internal organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan. Identifikasi ini dimaksudkan agar pemerintah, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Peternakan, dapat memaksimalkan potensi dirinya dalam upaya mencapai visi dan misi. Identifikasi permasalahan internal terdiri dari dua unsur yaitu kekuatan dan kelemahan organisasi.

Kekuatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya aparatur dengan komitmen yang tinggi dan berorientasi pada pencapaian visi dan misi
2. Adanya dukungan anggaran yang berbasis kinerja baik dari

pemerintah pusat, provinsi maupun daerah

3. Adanya kelembagaan yang sesuai dengan bidang kewenangan
4. Adanya program pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
5. Kondisi keamanan dan politik yang relatif stabil dengan terbentuknya kepemimpinan yang baru sebagai hasil pilihan langsung masyarakat
6. Jumlah penduduk usia produktif yang bergerak di sektor usaha peternakan, perikanan dan kelautan cukup tinggi
7. Adanya keinginan dan kesadaran masyarakat untuk meraih kemajuan dan bangkit dari ketertinggalan ekonomi
8. Masih tumbuhnya jiwa gotong royong, kebersamaan dan kerukunan antar warga masyarakat.
9. Sumber daya alam relatif cukup melimpah dan beragam sehingga bisa dimanfaatkan dalam mendukung peningkatan pembangunan sektor peternakan, perikanan dan kelautan

Kelemahan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut dalam pembangunan mendatang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Rendahnya daya dukung fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur
2. Belum optimalnya akses aparatur terhadap teknologi informasi dan teknologi tepat guna
3. Terdapatnya kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan dukungan anggaran yang tersedia
4. Kurangnya jumlah aparatur dan petugas teknis bila dibandingkan cakupan area kerja yang luas
5. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan sarana prasarana SKPD dalam mendukung pelayanan masyarakat
6. Kondisi geografis beberapa daerah yang relatif sulit dijangkau dan rawan bencana alam
7. Belum optimalnya kemampuan kelembagaan usaha masyarakat dalam mengakses manajemen usaha, permodalan, teknologi tepat guna dan tata niaga pasar

Upaya yang dilakukan secara internal dalam mengantisipasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan dilakukan dengan cara:

1. Melakukan perbaikan kinerja secara terus-menerus dalam meningkatkan pelayanan prima pada masyarakat melalui program pelayanan administrasi perkantoran yang efektif dan efisien;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM melalui aktifitas peningkatan disiplin aparatur dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
3. Melaksanakan program dan kegiatan pembangunan sesuai amanat undang-undang secara efektif, efisien dan tepat sasaran dengan mengedepankan prinsip *good governance*;
4. Meningkatkan fungsi perencanaan, evaluasi dan pelaporan melalui peningkatan pengembangan pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara transparan dan akuntabel;
5. Peningkatan Sarana Prasarana aparatur dalam menunjang kinerja organisasi secara efektif dan efisien.
6. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan pembangunan dengan organisasi dan lembaga terkait serta *stakeholder* di sektor peternakan, perikanan dan kelautan

#### **2.3.4 Tantangan**

Sebagai salah satu dinas teknis yang memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Garut, Dinas Perikanan dan Peternakan harus siap menghadapi tantangan yang cukup berat di masa depan. Era globalisasi dan otonomi daerah merupakan tantangan sekaligus peluang yang harus diantisipasi sejak dini dalam rangka meningkatkan upaya mensejahterakan masyarakat.

Tantangan dan peluang dari kinerja pelayanan Dinas Perikanan dan Peternakan harus siap menghadapi segala ancaman yang mungkin akan mengganggu pelaksanaan kinerja. Berdasarkan hasil identifikasi SWOT, ancaman yang mungkin muncul dalam pembangunan sektor peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Garut 3 (tiga) tahun ke depan diformulasikan sebagai berikut :

- Kondisi ekonomi makro yang belum stabil

- Dampak negatif arus informasi dan globalisasi yang semakin cepat
- Kebijakan pemerintah yang mengarah pada pasar bebas menyebabkan membanjirnya produk-produk impor yang berpotensi menyulitkan daya saing produk lokal untuk bersaing di tingkat regional, nasional maupun internasional
- Ditetapkannya 80% wilayah Kabupaten Garut sebagai kawasan lindung oleh pemerintah provinsi Jawa Barat menyebabkan sulitnya pengembangan wilayah untuk sektor peternakan, perikanan dan kelautan
- Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan akibat kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lahan secara lestari
- Masih terjadinya konflik kepentingan dalam perencanaan pembangunan yang berpotensi memunculkan kebijakan yang tidak pro-rakyat dan tidak tepat sasaran sehingga bisa menghambat pembangunan

Tantangan yang dihadapi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut antara lain :

- Wilayah dan komoditi peternakan, perikanan dan kelautan yang diusahakan masyarakat pada umumnya belum mengutamakan pada skala usaha ekonomis sehingga perlu dibentuk kawasan terpadu berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan produksi dan pemasaran.
- Profesionalisme, pengetahuan dan keterampilan peternak dan petugas, baik dalam proses produksi maupun pasca produksi, serta kemampuan manajemen usaha pemasarannya belum optimal.
- Kabupaten Garut memiliki potensi lahan peternakan, perikanan dan kelautan yang cukup luas untuk dikembangkan sehingga perlu lebih dioptimalkan dengan sistem pengelolaan yang intensif dan terpadu.
- Keterbatasan akses permodalan menyebabkan kebutuhan permodalan ditingkat kelompok usaha masih sulit terpenuhi, sehingga perlu ada upaya sinergis dalam meningkatkan permodalan melalui kerjasama dengan instansi dan lembaga keuangan terkait.
- Jumlah dan kualitas petugas teknis di lapangan masih kurang seimbang dibandingkan dengan luasnya jangkauan wilayah kerja serta masih kurang didukung oleh ketersediaan sarana transportasi dan fasilitas kerja yang memadai.

- Semakin menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan bagi pengembangan pembangunan di sektor peternakan, perikanan dan kelautan perlu diantisipasi melalui aktifitas pelestarian lingkungan dan pengembangan tata kelola lahan secara lestari
- Perlunya penataan kelembagaan petani/peternak, pembudidaya ikan dan nelayan sebagai wadah belajar bersama dalam rangka meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap sistem dan mekanisme pasar serta rantai tata niaga pemasaran.
- Proses pelaksanaan alih teknologi dari hasil – hasil penelitian menjadi teknologi terapan yang praktis, masih sering terkendala oleh terbatasnya jumlah dan kualitas petugas dilapangan sehingga perlu dicari solusi yang efektif.

Mengingat tantangan yang semakin besar di masa depan tersebut, maka perlu ada upaya perencanaan secara sistematis dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi secara lebih efisien dan efektif sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

### **2.3.5. Peluang**

Peluang untuk pembangunan sektor peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Garut diformulasikan sebagai berikut :

- Terbukanya peluang pengembangan usaha dan investasi khususnya di sektor peternakan, perikanan dan kelautan.
- Pemberlakuan otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal
- Semakin kondusifnya iklim demokratis dan mulai tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
- Terbukanya akses terhadap informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi terkait informasi peluang usaha dan pasar baik regional maupun global
- Adanya dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam pemberian modal bagi pengembangan usaha kecil dan menengah termasuk petani dan nelayan
- Meningkatnya perhatian pemerintah pusat maupun provinsi bagi pengembangan daerah melalui berbagai bantuan keuangan baik melalui DAK, Bantuan Provinsi/BanGub maupun Tugas Pembantuan

- Kondisi geografis Kabupaten Garut dengan topografi pegunungan dan pantai yang sangat sesuai bagi pengembangan komoditas peternakan, perikanan dan kelautan
- Akses Kabupaten Garut sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi dan Pusat cukup memadai dalam meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan dan perikanan
- Pembangunan jalan lintas selatan Jawa sebagai akses horizontal bagian selatan yang mendukung pengembangan potensi kelautan

### **2.3.6. Formulasi Isu-isu Penting dan Catatan Strategis dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan.**

Dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Perikanan dan Peternakan dan upaya pemecahan masalah, maka Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan kegiatan unggulan pembangunan Kabupaten Garut pada di sektor perikanan dan peternakan diantaranya adalah:

1. Pengembangan kawasan peternakan di Desa Sukaluyu Kec. Sukawening.
2. Rehabilitasi Rumah Potong Hewan (RPH) sesuai standar Nomor Kontrol Veteriner
3. Pengembangan sarana prasarana pelayanan medik veteriner;
4. Pengembangan sentra produksi perikanan;
5. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir;
6. Pengembangan sarana eduwisata Balai Benih Ikan (BBI); dan
7. Optimalisasi bantuan kepada kelompok tani, nelayan dan kelompok ternak
8. Gerakan memasyarakatkan makan Ikan (Gemarikan) dalam upaya penurunan stunting
9. Peningkatan kapasitas nelayan dan pembudidaya ikan
10. Pengawasan peredaran hewan, produk hewan serta analisis risiko penyebaran penyakit hewan
11. Peningkatan kualitas pakan ternak

## 12. Penyediaan prasarana dan sarana peternakan

Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023, ditetapkan sebanyak 8 program. Program tersebut terdiri atas 1 (satu) program kesekretariatan, 4 (empat) program urusan bidang kelautan dan perikanan dan 3 (tiga) program urusan bidang pertanian (peternakan). Adapun rencana program tersebut meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
3. Program Pengelolaan Perikanan Budiaya;
4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
5. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD**

Rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan (RKPD-P) Tahun 2023 dan evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II dengan melakukan penyesuaian target kinerja dan pagu kegiatan (penambahan atau pengurangan) berdasarkan atas hasil evaluasi serta mengakomodir perkembangan yang terjadi terkait tugas dan fungsi dalam menunjang pencapaian kinerja Perangkat daerah maupun menunjang terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.



Sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Garut, Dinas Perikanan dan Peternakan telah melakukan review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Rancangan Perubahan RKPD tahun 2023 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2023 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan. Hasil analisa kebutuhan terhadap Rancangan RKPD-P tercantum sebagaimana pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.  
Review terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD tahun 2023  
Kabupaten Garut

**Dinas Perikanan dan Peternakan**

No	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indika tor Kinerj a	Target Capaian		Pagu Indikatif		Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian			Pagu Indikatif	
				Semula	Menj adi	Semula	Menjadi				Sem ula	Menja di		Semula	Menjadi
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATE N/KOTA</b>		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	<b>15,422,000,000</b>	<b>13,485,621,189</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA</b>		Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	<b>15,422,000,000</b>	<b>13,485,621,189</b>	
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Dokumen perencanaan kinerja SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	<b>288,000,000</b>	<b>103,390,199</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Dokumen perencanaan kinerja SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen	<b>288,000,000</b>	<b>103,390,199</b>	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	53,000,000	43,024,819	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	52,500,000	52,000,000	

1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	0	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	0	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	

			yusuna nDoku men DPA- SKPD												
1.1.5	Koordinasi Koordinasi danPenyusu nanPerubah an DPA- SKPD	Kab. Garut, Sem uaKecama tan, Semua Kelurahan	Jumla h Dokum enPeru bahan DPA- SKPDd an Lapora n HasilK oordi nasiPen yusuna nDoku men Peruba hanDP A- SKPD	5 Dokume n	5 Dok ume n	20,000,000	0	Koordinasi Koordinasi danPenyusu nanPerubah an DPA- SKPD	Kab. Garut, Sem uaKecamat an, SemuaK elurahan	Jumlah DokumenPe rubahan DPA- SKPDdan Laporan HasilKoordi nasiPenyus unanDoku men Perubahan DPA-SKPD	5 Dok ume n	5 Dokum en	20,000,000	0	
1.1.6	Koordinasi danPenyusu nanLaporan CapaianKine rja danIkhtisar RealisasiKin erja SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamata n,	Jumla h Lapora nCapai an Kinerja danIkht tisar Realisa siKiner ja SKPD danLap oran HasilK oordi nasiPen yusuna n Lapora	16 laporan	16 L apor an	40,000,000	0	Koordinasi danPenyusu nanLaporan CapaianKine rja danIkhtisar RealisasiKin erja SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Jumlah LaporanCa paian Kinerja danIkhtisar RealisasiKi nerja SKPD danLaporan HasilKoordi nasiPenyus unan LaporanCa paian Kinerja danIkhtisar RealisasiKi nerja SKPD	16 lapor an	16 Lap oran	40,000,000	0	

			nCapaian Kinerja dan lkh tisar Realisasi Kinerja SKPD												
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	75,000,000	60,365,380	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	75,000,000	60,365,380	
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	14 Laporan	14 Laporan	<b>11,930,000,000</b>	<b>11,754,820,401</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	14 Laporan	14 Laporan	<b>11,930,000,000</b>	<b>11,754,820,401</b>	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	11,880,000,000	11,732,752,401	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	11,880,000,000	11,732,752,401	
1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Keuangan Bula	14 Laporan	14 Laporan	50,000,000	22,068,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Tri	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester	14 Laporan	14 Laporan	50,000,000	22,068,000	

	wulanan/Se mesteran SKPD		nan/ Triwulan/ Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD					wulanan/Se mesteran SKPD		n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD					
1.3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	<b>170,000,000</b>	<b>0</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	<b>170,000,000</b>	<b>0</b>	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	75,000,000	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	3 Paket	3 Paket	75,000,000	0	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas	6 Orang	6 Orang	60,000,000	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	6 Orang	6 Orang	60,000,000	0	

	Fungsi		dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan							Pendidikan dan Pelatihan					
1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	35.000.000	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	100 Orang	35.000.000	0	
1.4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	100 %	<b>646,000,000</b>	<b>406,618,800</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah	100 %	100 %	<b>646,000,000</b>	<b>406,618,800</b>	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	2 Paket	2 Paket	15,000,000	12,186,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	15,000,000	12,186,400	

			Disedia kan												
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumla h Paket Peralat an dan Perle ngkapan Kantor yang Disedia kan	5 Paket	5 Pa ket	160,000,000	154,930,600	Penyediaan Peralatan dan Perlengkap an Kantor	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Peralatan dan Perle ngkapan Kantor yang Disedia kan	5 Pa ket	5 Paket	160,000,000	154,930,600	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumla h Paket Barang Cetakan dan Pengga ndaan yang Disedia kan	6 Paket	6 Pa ket	30,000,000	21,180,500	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disedia kan	6 Pa ket	6 Paket	30,000,000	21,180,500	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumla h Dokum en Bahan Bacaan dan Peratur an Perund ang-Undan gan yang Disedia kan	12 Dokume	12 Dok ume	30,000,000	18,832,800	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disedia kan	12 Dok ume	12 Dokum e	30,000,000	18,832,800	
1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumla h Laporan Fasilitasi Kunjun	12 Laporan	12 Lapo ran	105,000,000	52,090,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Lapo ran	12 Lapora n	105,000,000	52,090,000	



			gan Tam u												
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garu Semua Kecamata Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	216,000,000	147,398,500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	216,000,000	147,398,500	
1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garu Semua Kecamata Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	50,000,000	0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	100 Dokumen	50,000,000	0	
1.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Garu Semua Kecamata Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Garu Semua Kecamata Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	0	

<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 unit	25 unit	<b>1,211,000,000</b>	<b>702,931,160</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 unit	25 unit	<b>1,211,000,000</b>	<b>702,931,160</b>	
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	261,000,000	74,480,000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	8 Unit	261,000,000	74,480,000	
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	250,000,000	209,248,200	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	250,000,000	209,248,200	
1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	350,000,000	419,202,960	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	350,000,000	419,202,960	

			Disedia kan												
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	350,000,000	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	350,000,000	0	
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Penyediaan jasa penunjang urusan Tersedia Jasa penunjang urusan perangkat daerah	12 Bulan 100 %	12 Bulan 100 %	<b>582,000,000</b>	<b>424,159,629</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Penyediaan jasa penunjang pelayanan kantor	12 bulan	12 bulan	<b>481,250,000</b>	<b>340,294,495</b>	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	12 Laporan	12 Laporan	132,000,000	132,756,230	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	132,000,000	132,756,230	

			Listrik yang Disediakan												
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	450,000,000	291,402,399	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	2 Laporan	450,000,000	291,402,399	
1.7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Pemeliharaan sarana dan prasarana Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	<b>595,000,000</b>	<b>93,702,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		Pemeliharaan sarana dan prasarana Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan 12 Bulan	12 Bulan 12 Bulan	<b>595,000,000</b>	<b>93,702,00</b>	

1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	110 Unit	145,000,000	93,702,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	110 Unit	110 Unit	145,000,000	93,702,000	
II	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		Persentase produksi perikanan tangkap	0,5 %	0,5 %	<b>4,850,000,000</b>	<b>7,677,991,900</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>		Persentase produksi perikanan tangkap	0,5 %	0,5 %	<b>4,850,000,000</b>	<b>7,677,991,900</b>	
2.1	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Jumlah Lokasi Pengelolaan penangkapan ikan	11 Lokasi	11 Lokasi	<b>2,620,000,000</b>	<b>6,950,855,150</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Jumlah Lokasi Pengelolaan penangkapan ikan	11 Lokasi	11 Lokasi	<b>2,620,000,000</b>	<b>6,950,855,150</b>	

2.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	
2.1.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Garu Banyuresm Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Cikelet, Se Kelurahan Kab. Garu Bungbula Semua Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	1,200,000,000	6,232,595,000	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Garu Banyuresm Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Cikelet, Se Kelurahan Kab. Garu Bungbula Semua Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	5 Unit	5 Unit	1,200,000,000	6,232,595,000	

		Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan							Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan						
2.1.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Garu Karangpa Semua Kelurahan Kab. Garu Wanaraja, Semua Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kidul, Sem Kelurahan Kab. Garu Banyuresm Semua Kelurahan Kab. Garu Samarang Semua Kelurahan Kab. Garu Leles, Sem Kelurahan Kab. Garu Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garu Banjarwan Semua Kelurahan Kab. Garu Cisewu, Pamalayan Kab. Garu Cibiuk, Se Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	10 Unit	10 Unit	1,320,000,000	718,260,150	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Kab. Garu Karangpa Semua Kelurahan Kab. Garu Wanaraja, Semua Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kidul, Sem Kelurahan Kab. Garu Banyuresm Semua Kelurahan Kab. Garu Samarang Semua Kelurahan Kab. Garu Leles, Sem Kelurahan Kab. Garu Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garu Banjarwan Semua Kelurahan Kab. Garu Cisewu, Pamalayan Kab. Garu Cibiuk, Se Kelurahan	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	10 Unit	10 Unit	1,320,000,000	718,260,150	

2.2	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir	5 kecamatan	5 kecamatan	<b>1,530,000,000</b>	<b>672,536,950</b>	<b>Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir	5 kecamatan	5 kecamatan	<b>1,530,000,000</b>	<b>672,536,950</b>	
2.2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Garu Pameung Jatimulya Kab. Garu Cibalong, Sancang Kab. Garu Cikelet, Pamalayan Kab. Garu Caringin, Indralayan Kab. Garu Caringin, Purbayani	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 kecamatan	5 kecamatan	800,000,000	601,997,800	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Kab. Garu Pameung Jatimulya Kab. Garu Cibalong, Sancang Kab. Garu Cikelet, Pamalayan Kab. Garu Caringin, Indralayan Kab. Garu Caringin, Purbayani	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	5 kecamatan	5 kecamatan	800,000,000	601,997,800	
2.2.2	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Cikelet, Se Kelurahan Kab. Garu Bungbula Semua Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	10 Kelompok	400,000,000	0	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Cikelet, Se Kelurahan Kab. Garu Bungbula Semua Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	10 Kelompok	10 Kelompok	400,000,000	0	



		Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan							Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan						
2.2.3	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Cikelet, Se Kelurahan Kab. Garu Bungbula Semua Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	330,000,000	70,539,150	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Cikelet, Se Kelurahan Kab. Garu Bungbula Semua Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	330,000,000	70,539,150	

2.3	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>		Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Unit	5 Unit	<b>700,000,000</b>	<b>54,599,800</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>		Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	5 Unit	5 Unit	<b>700,000,000</b>	<b>54,599,800</b>	
2.3.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	1 Layanan	700,000,000	54,599,800	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 Layanan	1 Layanan	700,000,000	54,599,800	
III	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1 %	1 %	<b>7,711,000,000</b>	<b>7,612,167,200</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>		Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	1 %	1 %	<b>7,711,000,000</b>	<b>7,612,167,200</b>	
3.1	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>		Peningkatan Kapasitas Produksi Hasil perikanan	6 Kelompok	6 Kelompok	<b>2,461,000,000</b>	<b>770,753,700</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>		Peningkatan Kapasitas Produksi Hasil perikanan	6 Kelompok	6 Kelompok	<b>2,461,000,000</b>	<b>770,753,700</b>	

3.1.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Garu Leles, Kandangm Kab. Garu Kadungor Semua Kelurahan Kab. Garu Kadungor Hegarsari Kab. Garu Pamulihan Garumukt Kab. Garu Pamulihan Panawa Kab. Garu Pangatika Sukamuly	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	7 Kelompok	7 Kelompok	2,161,000,000	770,753,700	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Garu Leles, Kandangm Kab. Garu Kadungor Semua Kelurahan Kab. Garu Kadungor Hegarsari Kab. Garu Pamulihan Garumukt Kab. Garu Pamulihan Panawa Kab. Garu Pangatika Sukamuly	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	7 Kelompok	7 Kelompok	2,161,000,000	770,753,700	
3.1.2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	10 Kelompok	10 Kelompok	100,000,000	0	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Kab. Garu Leles, Kandangm Kab. Garu Kadungor Semua Kelurahan Kab. Garu Kadungor Hegarsari Kab. Garu Pamulihan Garumukt Kab. Garu Pamulihan Panawa Kab. Garu Pangatika Sukamuly	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	7 Kelompok	7 Kelompok	2,161,000,000	770,753,700	

3.1.3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	5 Kelompok	5 Kelompok	100,000,000	0	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	-	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	5 Kelompok	5 Kelompok	100,000,000	0	
3.1.2	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Usaha yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan	5 Kelompok	5 Kelompok	100,000,000	0	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	5 Kelompok	5 Kelompok	100,000,000	0	

			an Pendidikan dan Pelatihan												
3.2	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>		Peningkatan dan Penjaminan ketersediaan sarana prasarana budidaya perikanan serta promosi perikanan	56 Kelompok	56 Kelompok	<b>5,250,000,000</b>	<b>6,841,413,500</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>		Peningkatan dan Penjaminan ketersediaan sarana prasarana budidaya perikanan serta promosi hasil perikanan	56 Kelompok	56 Kelompok	<b>5,250,000,000</b>	<b>6,841,413,500</b>	
3.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	0	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	0	
3.2.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua	Jumlah Prasarana	8 Unit	8 Unit	2,155,000,000	1,501,413,500	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan	8 Unit	8 Unit	2,155,000,000	1,501,413,500	

	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kelurahan Kab. Garu Garut Kot Semua Kelurahan Kab. Garu Bayongbo Semua Kelurahan	Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kelurahan Kab. Garu Garut Kot Semua Kelurahan Kab. Garu Bayongbo Semua Kelurahan	dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota					
3.2.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kaler, Sem Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kidul, Sem Kelurahan Kab. Garu Banyuwesem Semua Kelurahan Kab. Garu Samarang Semua Kelurahan Kab. Garu Leles, Sem Kelurahan Kab. Garu Kadungor Semua Kelurahan Kab. Garu Cibatu, Se Kelurahan Kab. Garu Malangbo Semua	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	118 Unit	118 Unit	2,770,000,000	5,340,000,000	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kaler, Sem Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kidul, Sem Kelurahan Kab. Garu Banyuwesem Semua Kelurahan Kab. Garu Samarang Semua Kelurahan Kab. Garu Leles, Sem Kelurahan Kab. Garu Kadungor Semua Kelurahan Kab. Garu Cibatu, Se Kelurahan Kab. Garu Malangbo Semua	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	118 Unit	118 Unit	2,770,000,000	5,340,000,000	

		Kelurahan Kab. Garu Cilawu, Se Kelurahan Kab. Garu Sukaresm Semua Kelurahan Kab. Garu Banjarwan Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Cisewu, S Kelurahan nKab. Garu Talegong, Semua Kelurahan							Kelurahan Kab. Garu Cilawu, Se Kelurahan Kab. Garu Sukaresm Semua Kelurahan Kab. Garu Banjarwan Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Cisewu, S Kelurahanann Kab. Garu Talegong, Semua Kelurahan						
3.2.3	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan	50 Orang	50 Orang	215,000,000	0	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	50 Orang	50 Orang	215,000,000	0	

			Pembudidayaan Ikan di Darat												
IV	<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</b>		Lokasi Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	<b>400,000,000</b>	<b>152,760,600</b>	<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</b>		Lokasi Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	<b>400,000,000</b>	<b>152,760,600</b>	
4.1	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota</b>		Pembinaan dan bantuan sarana prasarana patroli pengawasan Pokmaswas	7 Kelompok	7 Kelompok	<b>400,000,000</b>	<b>152,760,600</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota</b>		Pembinaan dan bantuan sarana prasarana patroli pengawasan Pokmaswas	7 Kelompok	7 Kelompok	<b>400,000,000</b>	<b>152,760,600</b>	



4.1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Kab. Garu Banyuresm Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Cikelet, Se Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	152,760,600	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Kab. Garu Banyuresm Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Cikelet, Se Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	152,760,600	
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	3 %	3 %	<b>1,351,000,000</b>	<b>1,518,194,740</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>		Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan	3 %	3 %	<b>880,715,000</b>	<b>900,666,768</b>	

5.1	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>		Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan pangan Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan pangan	8 Kelompok	8 Kelompok	<b>375,000,000</b>	<b>0</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>		Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan pangan Terlaksananya pembinaan mutu dan keamanan pangan	8 Kelompok	8 Kelompok	<b>375,000,000</b>	<b>0</b>	
-----	--	--	--	------------	------------	--------------------	----------	--	--	--	------------	------------	--------------------	----------	--

5.1.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	375,000,000	0	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	375,000,000	0		
-------	--	---	---	--------------	--------------	-------------	---	--	---	---	--------------	--------------	-------------	---	--	--

5.2	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Jumlah unit sarana pemasaran terban gun	3 unit	3 unit	<b>976,000,000</b>	<b>1,518,194,740</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Jumlah unit sarana pemasaran terbangun	3 unit	3 unit	<b>976,000,000</b>	<b>1,518,194,740</b>	
5.2.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Ton	5 Ton	576,000,000	218,194,740	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	5 Ton	5 Ton	576,000,000	218,194,740	
5.2.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1	1 paket	1 paket	400,000,000	1,300,000,000	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi	1 paket	1 paket	400,000,000	1,300,000,000	

			(Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi												
VI	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN</b>		Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	3 %	3 %	<b>20,882,000,000</b>	<b>3,623,659,280</b>	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBA NGAN SARANA PERTANIAN</b>		Persentase peningkatan produksi hasil peternakan	3 %	3 %	<b>20,882,000,000</b>	<b>3,623,659,280</b>	
6.1	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>		Pengelolaan sumberdaya genetik hewan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	<b>1,540,000,000</b>	<b>242,684,480</b>	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota</b>		Pengelolaan sumberdaya genetik hewan	10 Kecamatan	10 Kecamatan	<b>1,540,000,000</b>	<b>242,684,480</b>	
6.1.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Leles, Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan	Jumlah SDG Hewan /Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2 VUB	2 VUB	250,000,000	0	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Leles, Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	2 VUB	2 VUB	250,000,000	0	

6.1.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	700,000,000	116,465,980	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	700,000,000	116,465,980	
6.1.3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	590,000,000	126,218,500	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	1 Dokumen	1 Dokumen	590,000,000	126,218,500	
6.2	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Pengawasan dan Pengendalian Bibit ternak dan HPT Pengendalian dan Pendistribusian Bibit ternak dan HPT	12 Kali 8 Kelompok	12 Kali 8 Kelompok	<b>1,262,000,000</b>	<b>80,234,900</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Pengawasan dan Pengendalian Bibit ternak dan HPT Pengendalian dan Pendistribusian Bibit ternak dan HPT	12 Kali 8 Kelompok	12 Kali 8 Kelompok	<b>1,262,000,000</b>	<b>80,234,900</b>	
6.2.1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua	Jumlah Benih/Bibit Ternak	100 Ekor	100 Ekor	820,000,000	0	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	100 Ekor	100 Ekor	820,000,000	0	

	Kelurahan Kab. Garu Semua Kecamata Semua Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kidul, Mekargali Kab. Garu Banyures m Banyures m Kab. Garu Leles, Ciburial Kab. Garu Malangbo Sekarwan Kab. Garu Bayongbo Semua Kelurahan Kab. Garu Cigedug, Semua Kelurahan Kab. Garu Cilawu, Semua Kelurahan Kab. Garu Cisurupan Semua Kelurahan Kab. Garu Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garu Banjarwan Banjarwan	yang Bereda r						Kelurahan Kab. Garu Semua Kecamata Semua Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kidul, Mekargali Kab. Garu Banyuresm Banyuresm Kab. Garu Leles, Ciburial Kab. Garu Malangbo Sekarwan Kab. Garu Bayongbo Semua Kelurahan Kab. Garu Cigedug, Semua Kelurahan Kab. Garu Cilawu, Semua Kelurahan Kab. Garu Cisurupan Semua Kelurahan Kab. Garu Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garu Banjarwan Banjarwan					
--	---	---------------------	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

6.2.2	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	50 Ton	50 Ton	442,000,000	80,234,900	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	50 Ton	50 Ton	442,000,000	80,234,900	
6.3	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain</b>		Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi pengadaan benih dan bibi ternak	50 Kelompok	50 Kelompok	<b>18,080,000,000</b>	<b>3,300,739,900</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain</b>		Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi pengadaan benih dan bibi ternak	50 Kelompok	50 Kelompok	<b>18,080,000,000</b>	<b>3,300,739,900</b>	
6.3.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Karangpa Karangmu Kab. Garu Karangpa Jatisari Kab. Garu Karangpa Godog Kab. Garu Karangpa Tanjungsa	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	3088 Ekor	3088 Ekor	18,080,000,000	3,300,739,900	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Karangpa Karangmu Kab. Garu Karangpa Jatisari Kab. Garu Karangpa Godog Kab. Garu Karangpa Tanjungsa	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	3088 Ekor	3088 Ekor	18,080,000,000	3,300,739,900	



		Kab. Garu Karangpa Situsaeur Kab. Garu Wanaraja, Wanamek Kab. Garu Tarogong Rancaban Kab. Garu Tarogong Pasawaha Kab. Garu Tarogong Kidul, Suk Kab. Garu Tarogong Kidul, Mekargali Kab. Garu Banyures m Sukakarya Kab. Garu Banyures m Sukamukt Kab. Garu Banyures m Sukalaksa Kab. Garu Leles, Cib Kab. Garu Kadungor Gandame Kab. Garu Kadungor Cikembula Kab. Garu Kadungor Mandalas Kab. Garu Kadungor Harumans								Kab. Garu Karangpa Situsaeur Kab. Garu Wanaraja, Wanamek Kab. Garu Tarogong Rancaban Kab. Garu Tarogong Pasawaha Kab. Garu Tarogong Kidul, Suk Kab. Garu Tarogong Kidul, Mekargali Kab. Garu Banyuresm Sukakarya Kab. Garu Banyuresm Sukamukt Kab. Garu Banyuresm Sukalaksa Kab. Garu Leles, Cib Kab. Garu Kadungor Gandame Kab. Garu Kadungor Cikembula Kab. Garu Kadungor Mandalas Kab. Garu Kadungor Harumans Kab. Garu Malangbo Sukaratu					
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Kab. Garu Malangbo Sukaratu													
7	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>		Prasarana yang dibangun/dikembangkan	10 %	10 %	<b>6,765,000,000</b>	<b>6,414,219,675</b>	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>		Prasarana yang dibangun/dikembangkan	10 %	10 %	<b>6,765,000,000</b>	<b>6,414,219,675</b>	
7.1	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>		Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	8 Unit	8 Unit	<b>3,565,000,000</b>	<b>2,785,052,700</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>		Jumlah prasarana pertanian yang terbangun	8 Unit	8 Unit	<b>3,565,000,000</b>	<b>2,785,052,700</b>	
7.1.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Garu Cigedug, Cigedug Kab. Garu Cigedug, Barusuda Kab. Garu Cigedug, Sukahurip Kab. Garu Cigedug, Sindangsa Kab. Garu Cigedug, Cintanaga Kab. Garu Sukaresm Sukamuly Kab. Garu Peundeuy Purwajaya	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	7 Unit	7 Unit	655,000,000	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Kab. Garu Cigedug, Cigedug Kab. Garu Cigedug, Barusuda Kab. Garu Cigedug, Sukahurip Kab. Garu Cigedug, Sindangsa Kab. Garu Cigedug, Cintanaga Kab. Garu Sukaresm Sukamuly Kab. Garu Peundeuy Purwajaya	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	7 Unit	7 Unit	655,000,000	0	

7.1.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Garu Karangpa Sitasaur Kab. Garu Kadungor Tanggulu Kab. Garu Sukaresm Sukajaya Kab. Garu Sukaresm Padamukt Kab. Garu Cibiuk, Lingkung	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	600,000,000	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Kab. Garu Karangpa Sitasaur Kab. Garu Kadungor Tanggulu Kab. Garu Sukaresm Sukajaya Kab. Garu Sukaresm Padamukt Kab. Garu Cibiuk, Lingkung	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	5 Unit	5 Unit	600,000,000	0	
7.1.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Garu Banjarwan Padahurip Kab. Garu Banjarwan Mulyajaya Kab. Garu Banjarwan Tanjungja Kab. Garu Cisompet, Panyindan Kab. Garu Cisompet, Neglasari Kab. Garu Mekarmuk Jayabaya	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	7 Unit	700,000,000	0	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Kab. Garu Banjarwan Padahurip Kab. Garu Banjarwan Mulyajaya Kab. Garu Banjarwan Tanjungja Kab. Garu Cisompet, Panyindan Kab. Garu Cisompet, Neglasari Kab. Garu Mekarmuk Jayabaya	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	7 Unit	7 Unit	700,000,000	0	
7.1.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Garut, Wanaraja Semua Kelurahan Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	800,000,000	94,949,000	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Kab. Garut, Wanaraja Semua Kelurahan Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	2 Unit	800,000,000	94,949,000	

7.1.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Garu Wanaraja, Semua Kelurahan Kab. Garu Cilawu, Se Kelurahan Lainnya Kab. Garu Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Selaawi, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	6 Unit	800,000,000	2,690,103,700	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Kab. Garu Wanaraja, Semua Kelurahan Kab. Garu Cilawu, Se Kelurahan Kab. Garu Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Selaawi, Semua Kelurahan	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	6 Unit	6 Unit	800,000,000	2,690,103,700	
7.2	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Terbangunnya sentra pembibitan ternak	1 Lokasi	1 Lokasi	<b>3,200,000,000</b>	<b>3,629,166,975</b>	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Terbangunnya sentra pembibitan ternak	1 Lokasi	1 Lokasi	<b>3,200,000,000</b>	<b>3,629,166,975</b>	

7.2.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Garu Sukaweni Sukaluyu	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan	3,200,000,000	3,629,166,975	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Kab. Garu Sukaweni Sukaluyu	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	1 Laporan	1 Laporan	3,200,000,000	3,629,166,975	
VII	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>		Persentase penurunan jumlah kasus penyakit ternak	5,00 %	5,00 %	<b>2,680,000,000</b>	<b>1,393,849,000</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>		Persentase penurunan jumlah kasus penyakit ternak	5,00 %	5,00 %	<b>2,680,000,000</b>	<b>1,393,849,000</b>	
8.1	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Peningkatan sarana Prasarana Pelayanan Keswan	42 Kecamatan	42 Kecamatan	<b>1,350,000,000</b>	<b>77,700,300</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Peningkatan sarana Prasarana Pelayanan Keswan	42 Kecamatan	42 Kecamatan	<b>1,350,000,000</b>	<b>77,700,300</b>	

8.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	78,400,300	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	78,400,300	
8.1.2	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	12 Laporan	1,200,000,000	0	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan	12 Laporan	1,200,000,000	0	
8.2	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Jumlah Pengawasan Hewan dan Produk Asal hewan (PAH) dalam satu tahun	12 Kali	12 Kali	<b>250,000,000</b>	<b>44,194,200</b>	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Jumlah Pengawasan Hewan dan Produk Asal hewan (PAH) dalam satu tahun	12 Kali	12 Kali	<b>250,000,000</b>	<b>44,194,200</b>	

8.2.1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan	150,000,000	44,194,200	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan	150,000,000	44,194,200	
8.2.2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	0	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	0	
8.2.3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	0	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	0	

			Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota							Kota					
8.3	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Peningkatan sarana Prasarana Pelayanan Keswan	5 unit	5 unit	<b>830,000,000</b>	<b>1,010,161,500</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>		Peningkatan sarana Prasarana Pelayanan Keswan	5 unit	5 unit	<b>830,000,000</b>	<b>1,010,161,500</b>	
8.3.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	1 Laporan	230,000,000	0	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1 Laporan	1 Laporan	230,000,000	0	



8.3.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Wanaraja Semua Kelurahan Kab. Garu Cilawu, Se Kelurahan Kab. Garu Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Selaawi, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	12 Laporan	600,000,000	1,010,161,500	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Wanaraja Semua Kelurahan Kab. Garu Cilawu, Se Kelurahan Kab. Garu Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Selaawi, Semua Kelurahan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 laporan	12 Laporan	600,000,000	1,010,161,500	
8.4	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>		Pemeriksaan, pengawasan dan pendataan penyakit hewan dan keamanan produk hewan	12 Kali	12 Kali	<b>250,000,000</b>	<b>261,793,000</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>		Pemeriksaan, pengawasan dan pendataan penyakit hewan dan keamanan produk hewan	12 Kali	12 Kali	<b>250,000,000</b>	<b>261,793,000</b>	

8.4.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	0	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	0	
8.4.2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan	150,000,000	261,793,000	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	4 Laporan	4 Laporan	150,000,000	261,793,000	
IX	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		Peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan usaha peternakan	5 %	5 %	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>		Peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan usaha peternakan	5 %	5 %	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	
9.1	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Penerbitan Izin usaha Peternakan dan kesehatan hewan	12 laporan	12 Laporan	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>		Penerbitan Izin usaha Peternakan dan kesehatan hewan	12 laporan	12 Laporan	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	

9.1.1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	
9.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	12 laporan	12 laporan	40,000,000	0	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	12 laporan	12 laporan	40,000,000	0	
IX	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		Peningkatan Bimbingan dan penyuluhan terhadap kelompok Peternak dan pelaku usaha peternakan	10 %	10 %	<b>319,000,000</b>	<b>0</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>		Peningkatan Bimbingan dan penyuluhan terhadap kelompok Peternak dan pelaku usaha peternakan	10 %	10 %	<b>319,000,000</b>	<b>0</b>	

9.1	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>		Terlaksananya Penyuluhan terhadap Peternak dan pelaku usaha peternakan	12 Kali	12 Kali	<b>319,000,000</b>	<b>0</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>		Terlaksananya Penyuluhan terhadap Peternak dan pelaku usaha peternakan	12 Kali	12 Kali	<b>319,000,000</b>	<b>0</b>	
9.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	2 Unit	100,000,000	0	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2 Unit	2 Unit	100,000,000	0	
9.1.2	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	2 Unit	2 Unit	150,000,000	0	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	2 Unit	2 Unit	150,000,000	0	

9.1.3	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	2 Unit	69,000,000	0	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	2 Unit	2 Unit	69,000,000	0		
	<b>Jumlah</b>					<b>29.734.000.000</b>	<b>30.446.735.629</b>							<b>29.734.000.000</b>	<b>30.446.735.629</b>	

Sumber: Pengelolaan SIPD Tahun 2023

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana kerja dan pendanaan indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan selama satu tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dengan sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra SKPD. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Rencana program indikatif dimaksudkan sebagai pedoman bagi aktifitas pembangunan yang dilaksanakan Dinas Perikanan dan Peternakan selama satu tahun ke depan. Program diuraikan berdasarkan target pencapaian sasaran SKPD serta mengacu pada penetapan program kegiatan sebagaimana tercantum dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diperbaharui dengan Permendagri Nomor. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Untuk sasaran program dan indikator kinerja mengacu pada tujuan dan sasaran Dinas sebagaimana tercantum dalam Renstra.

#### **3.1 Target Kinerja Sasaran**

Mengacu pada Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024 dan dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dinas Perikanan dan Peternakan pada Tahun 2023 menetapkan dua sasaran pembangunan yaitu:

3. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan;

4. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal.

Selanjutnya, sesuai dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024, pada Tahun 2022 ditetapkan target capaian kinerja sebagai berikut:

<b>SASARAN</b>			
<b>URAIAN</b>	<b>INDIKATOR</b>		<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
1. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan melalui pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan	1	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	65,662.00
	2	Produksi Perikanan Tangkap (ton)	1,468
	3	Produksi dan pemasaran produk olahan hasil perikanan (Ton)	765
2. Meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan berbasis potensi lokal	1	Produksi Hasil Peternakan (ton)	38,467
	2	Produksi dan pemasaran produk olahan hasil peternakan (ton)	898
	3	Penurunan jumlah kasus penyakit ternak dan peningkatan pengawasan kualitas pangan asal hewan (%)	5

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024

### **3.2 Rencana Program Kegiatan**

Program / kegiatan Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut mencakup *Sasaran, Program dan Kegiatan* yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2023 dengan mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Peternakan Tahun 2019-2024. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan dan Peternakan pada tahun 2023 direncanakan akan

melaksanakan 8 program yang terdiri dari 1 (satu) program kesekretariatan, 4 (empat) program urusan kelautan dan perikanan dan 3 (tiga) program urusan pertanian (peternakan) dengan rincian sebagai berikut :

**I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - e. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

## **II. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap**

- 1. Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
  - b. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
- 1. Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
  - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
- 2. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
  - a. Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

## **III. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya**

- 1. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil;
  - a. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- 2. Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

## **IV. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan**

- 1. Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota.
  - a. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota

## **V. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan**

1. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
  - a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
2. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - b. Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

## **VI. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian**

1. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota;
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
  - b. Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
2. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
3. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

## **VII. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian**

1. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian;
  - a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
  - b. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

2. Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
  - a. Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

### **VIII. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**

1. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota;
  - a. Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
2. Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan
3. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
4. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
  - a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

### **3.3 Gerakan Besar dan Kegiatan Unggulan**

Berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan, pada Tahun 2023 Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan kegiatan unggulan yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Perbibitan Domba Garut di Desa Sukaluyu Kecamatan Sukawening;
2. Pengelolaan Perairan Umum Daratan (PUD) dan restocking PUD
3. Optimalisasi Pusat Kesehatan Hewan
4. Peningkatan layanan Kesehatan hewan dan peningkatan surveillance penyakit hewan
5. Rehabilitasi Rumah Potong Hewan;

6. Peningkatan sarana dan Prasarana pembibitan ternak;
7. Optimalisasi pengelolaan pakan ternak
8. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
9. Peningkatan layanan public sektor perikanan dan peternakan
10. Optimalisasi bantuan kepada kelompok peternakan dan perikanan

Selain menetapkan dua belas kegiatan unggulan, Dinas Perikanan dan Peternakan juga mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat inovasi diantaranya yang sudah berjalan adalah kegiatan inovasi Posyandu Ternak Keliling. Dalam periode Tahun 2019-2024, Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan satu kegiatan inovasi untuk setiap bidang yaitu inovasi Bidang Perikanan Tangkap, inovasi bidang Perikanan Budidaya, inovasi bidang Peternakan dan inovasi bidang Kesehatan Hewan & Kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam rangka penanggulangan dan pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku Dinas Perikanan dan peternakan menetapkan kegiatan pendukung yaitu Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

Dalam rangka gerakan penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID 19, Dinas Perikanan dan Peternakan menetapkan tiga program pendukung bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID 19 yaitu Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Program Penyuluhan Pertanian. Ketiga program tersebut akan dikhususkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan pelatihan dan bantuan usaha.

**Tabel 3.1. Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2023**

NO	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2024		
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja Pagu Indikatif		Pagu Indikatif			Sumbe Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
				Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah				
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran</b>		100 %	100 %	15,422,000,000	13,485,621,189		100 %	16,400,500,000	
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Dokumen perencanaan kinerja SKPD</b>		7 Dokumen	7 Dokumen	288,000,000	103,390,199		7 Dokumen	316,800,000	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		2 Dokumen	52,500,000	52,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer		58,300,000	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer	1 Dokumen	44,000,000	

1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	5 Dokumen	30,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer	5 Dokumen	33,000,000
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer	1 Dokumen	33,000,000
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	5 Dokumen	20,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer	5 Dokumen	22,000,000
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	16 laporan	16 Laporan	40,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer	16 laporan	44,000,000
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Laporan	5 Laporan	75,000,000	60,365,380	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer	5 Laporan	82,500,000

<b>1.2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Penyusunan Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>		<b>14 Laporan</b>	<b>14 Laporan</b>	<b>11,930,000,000</b>	<b>11,754,820,401</b>			<b>14 Laporan</b>	<b>13,123,000,000</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	110 Orang/bulan	110 Orang/bulan	11,880,000,000	11,732,752,401	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110 Orang/bulan	13,068,000,000
1.2.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	14 Laporan	14 Laporan	50,000,000	22,068,000	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 Laporan	55,000,000
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>170,000,000</b>	<b>0</b>			<b>100 %</b>	<b>121.000.000</b>
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	3 Paket	3 Paket	75,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 Paket	82,500,000

1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	6 Orang	6 Orang	60,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Orang	0
1.3.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100 Orang	100 Orang	35.000.000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Orang	38,500,000
<b>1.4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat daerah</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>646,000,000</b>	<b>406,618,800</b>			<b>100 %</b>	<b>710,600,000</b>
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Paket	2 Paket	15,000,000	12,186,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Paket	16,500,000
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	5 Paket	5 Paket	160,000,000	154,930,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Paket	176,000,000
1.4.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	6 Paket	6 Paket	30,000,000	21,180,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		6 Paket	33,000,000
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	12 Dokumen	12 Dokumen	30,000,000	18,832,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	33,000,000



1.4.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	12 Laporan	12 Laporan	105,000,000	52,090,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	115,500,000
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	12 Laporan	12 Laporan	216,000,000	147,398,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	237,600,000
1.4.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Garut, Semua Kecamatan,	100 Dokumen	100 Dokumen	50,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Dokumen	55,000,000
1.4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	44,000,000
<b>1.5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>25 unit</b>	<b>25 unit</b>	<b>1,211,000,000</b>	<b>702,931,160</b>			<b>25 unit</b>	<b>1,332,100,000</b>
1.5.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	8 Unit	8 Unit	261,000,000	74,480,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		8 Unit	287,100,000
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	15 Unit	15 Unit	250,000,000	209,248,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 Unit	275,000,000
1.5.3	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Kab. Garu Semua Kecamatan	2 Unit	2 Unit	350,000,000	419,202,960	Dana Transfer Umum-		2 Unit	385,000,000

		Disediakan	Semua Kelurahan					Dana Alokasi Umum			
1.5.4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Unit	2 Unit	350,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Unit	385,000,000
1.6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Penyediaan jasa penunjang pelayanan kantor		12 bulan	12 bulan	<b>481,250,000</b>	<b>340,294,495</b>			12 bulan	<b>637,500,000</b>
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	132,000,000	132,756,230	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	142,500,000
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Laporan	2 Laporan	450,000,000	291,402,399	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Laporan	495,000,000
<b>1.7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Pemeliharaan sarana dan prasarana anan Daerah</b>		<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>595,000,000</b>	<b>93,702,00</b>			<b>12 Bulan</b>	<b>159,500,000</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	110 Unit	110 Unit	145,000,000	93,702,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		110 Unit	159,500,000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>Persentase produksi perikanan tangkap</b>		<b>0,5 %</b>	<b>0,5 %</b>	<b>4,850,000,000</b>	<b>7,677,991,900</b>			<b>0,5 %</b>	<b>5,323,000,000</b>

<b>2.1</b>	<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Lokasi Pengelolaan penangkapan ikan</b>		<b>11 Lokasi</b>	<b>11 Lokasi</b>	<b>2,620,000,000</b>	<b>6,950,855,150</b>			<b>11 Lokasi</b>	<b>2,870,000,000</b>
2.1.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Garut Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	110.000.000
2.1.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Kab. Garu Banyuresm Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Cikelet, Se Kelurahan Kab. Garu Bungbula Semua Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan	5 Unit	5 Unit	1,200,000,000	6,232,595,000	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik		5 Unit	1.320.000.000

2.1.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kab. Garu Karangpa Semua Kelurahan Kab. Garu Wanaraja, Semua Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kidul, Sem Kelurahan Kab. Garu Banyuresm Semua Kelurahan Kab. Garu Samarang Semua Kelurahan Kab. Garu Leles, Sem Kelurahan Kab. Garu Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garu Banjarwan Semua Kelurahan Kab. Garu Cisewu, Pamalayan Kab. Garu Cibiuk, Se Kelurahan	10 Unit	10 Unit	1,320,000,000	718,260,150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah		10 Unit	1.440.000.000
2.2	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan nelayan dan masyarakat pesisir		5 kecamatan	5 kecamatan	1,530,000,000	672,536,950			5 kecamatan	1.683.000.000

2.2.1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Garu Pameung Jatimulya Kab. Garu Cibalong, Sancang Kab. Garu Cikelet, Pamalayan Kab. Garu Caringin, Indralayan Kab. Garu Caringin, Purbayani	5 kecamatan	5 kecamatan	800,000,000	601,997,800		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	5 kecamatan	880.000.000
2.2.2	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Cikelet, Se Kelurahan Kab. Garu Bungbula Semua Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin,	10 Kelompok	10 Kelompok	400,000,000	0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 Kelompok	440.000.000

			Semua Kelurahan								
2.2.3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Cikelet, Se Kelurahan Kab. Garu Bungbula Semua Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan	7 Unit Usaha	7 Unit Usaha	330,000,000	70,539,150			7 Unit Usaha	363.000.000
<b>2.3</b>	<b>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>	<b>Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</b>		<b>5 Unit</b>	<b>5 Unit</b>	<b>700,000,000</b>	<b>54,599,800</b>			<b>5 Unit</b>	<b>770.000.000</b>

2.3.1	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan	1 Layanan	1 Layanan	700,000,000	54,599,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Layanan	770.000.000
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya</b>		<b>1 %</b>	<b>1 %</b>	<b>7,711,000,000</b>	<b>7,612,167,200</b>			<b>1 %</b>	<b>6,658,000,000</b>
<b>3.1</b>	<b>Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil</b>	<b>Peningkatan Kapasitas Produksi Hasil perikanan</b>		<b>6 Kelompok</b>	<b>6 Kelompok</b>	<b>2,461,000,000</b>	<b>770,753,700</b>			<b>6 Kelompok</b>	<b>1,030,000,000</b>

3.1.1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Garu Leles, Kandangm Kab. Garu Kadungor Semua Kelurahan Kab. Garu Kadungor Hegarsari Kab. Garu Pamulihan Garumukt Kab. Garu Pamulihan Panawa Kab. Garu Pangatika Sukamuly	7 Kelompok	7 Kelompok	2,161,000,000	770,753,700	Dana Transfer Umum-Dana Alo kasi Umum		7 Kelompok	700,000,000
3.1.2	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kab. Garu Leles, Kandangm Kab. Garu Kadungor Semua Kelurahan Kab. Garu Kadungor Hegarsari Kab. Garu Pamulihan Garumukt Kab. Garu Pamulihan Panawa Kab. Garu Pangatika Sukamuly	7 Kelompok	7 Kelompok	2,161,000,000	770,753,700	Dana Transfer Umum-Dana Alo kasi Umum		7 Kelompok	110,000,000
3.1.3	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	-	5 Kelompok	5 Kelompok	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alo kasi Umum		5 Kelompok	110,000,000



3.1.2	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	5 Kelompok	5 Kelompok	100,000,000	0			5 Kelompok	110,000,000
<b>3.2</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Peningkatan dan Penjaminan ketersediaan sarana prasarana budidaya perikanan serta promosi hasil perikanan</b>		<b>56 Kelompok</b>	<b>56 Kelompok</b>	<b>5,250,000,000</b>	<b>6,841,413,500</b>			<b>56 Kelompok</b>	<b>5,628,000,000</b>
3.2.1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	110,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	121,000,000
3.2.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Garut Kot Semua Kelurahan Kab. Garu Bayongbo Semua Kelurahan	8 Unit	8 Unit	2,155,000,000	1,501,413,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dan a Transfer Khusus-Dana Alokasi Fisik		8 Unit	2,370,500,000

3.2.3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kaler, Sem Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kidul, Sem Kelurahan Kab. Garu Banyuresm Semua Kelurahan Kab. Garu Samarang Semua Kelurahan Kab. Garu Leles, Sem Kelurahan Kab. Garu Kadungor Semua Kelurahan Kab. Garu Cibatu, Se Kelurahan Kab. Garu Malangbo Semua Kelurahan Kab. Garu Cilawu, Se Kelurahan Kab. Garu Sukaresm Semua Kelurahan Kab. Garu Banjarwan Semua	118 Unit	118 Unit	2,770,000,000	5,340,000,000	Dan a Tran sfer Kh u su s- Dan a Alokasi Khusus Fisik		118 Unit	2,900,000,000
-------	--	---	--	-------------	-------------	---------------	---------------	--	--	----------	---------------

			Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Cisewu, S KelurahannK ab. Garu Talegong, Semua Kelurahan Dana Tran sfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Tran sfer Kh u su s-Dana Alokasi Khusus Fisik								
3.2.3	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	50 Orang	50 Orang	215,000,000	0	Dana Tran sfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Orang	236,500,000
<b>IV</b>	<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan</b>	<b>Lokasi Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan</b>		<b>7 Kecamatan</b>	<b>7 Kecamatan</b>	<b>400,000,000</b>	<b>152,760,600</b>			<b>7 Kecamatan</b>	<b>440,000,000</b>
<b>4.1</b>	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan</b>	<b>Pembinaan dan bantuan sarana prasarana patroli</b>		<b>7 Kelompok</b>	<b>7 Kelompok</b>	<b>400,000,000</b>	<b>152,760,600</b>			<b>7 Kelompok</b>	<b>440,000,000</b>

	<b>Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>	<b>pengawasan Pokmaswas</b>									
4.1.1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Kab. Garu Banyuresm Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan Kab. Garu Cikelet, Se Kelurahan Kab. Garu Mekarmuk Semua Kelurahan Kab. Garu Pakenjeng Semua Kelurahan Kab. Garu Caringin, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	400,000,000	152,760,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	440,000,000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>Persentase peningkatan produksi olahan hasil perikanan</b>		<b>3 %</b>	<b>3 %</b>	<b>880,715,000</b>	<b>900,666,768</b>			<b>3 %</b>	<b>1,486,100,000</b>
<b>5.1</b>	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>	<b>Jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan mutu dan keamanan pangan</b>		<b>8 Kelompok</b>	<b>8 Kelompok</b>	<b>375,000,000</b>	<b>0</b>			<b>8 Kelompok</b>	<b>412,500,000</b>

5.1.1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	375,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit Usaha	412,500,000
5.2	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah unit sarana pemasaran terbangun</b>		<b>3 unit</b>	<b>3 unit</b>	<b>976,000,000</b>	<b>1,518,194,740</b>			<b>3 unit</b>	<b>1,073,600,000</b>
5.2.1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garut, Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	5 Ton	5 Ton	576,000,000	218,194,740	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 Ton	633,600,000
5.2.2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 paket	1 paket	400,000,000	1,300,000,000	Dana Transfer Khusus Fisik		1 paket	440,000,000
VI	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Persentase peningkatan produksi hasil peternakan</b>		<b>3 %</b>	<b>3 %</b>	<b>20,882,000,000</b>	<b>3,623,659,280</b>			<b>3 %</b>	<b>22,970,200,000</b>
6.1	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengelolaan sumberdaya genetik hewan</b>		<b>10 Kecamatan</b>	<b>10 Kecamatan</b>	<b>1,540,000,000</b>	<b>242,684,480</b>			<b>10 Kecamatan</b>	<b>1,694,000,000</b>

6.1.1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Leles, Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua Kelurahan	2 VUB	2 VUB	250,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 VUB	275,000,000
6.1.2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	700,000,000	116,465,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	770,000,000
6.1.3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kaler, Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	590,000,000	126,218,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	649,000,000
<b>6.2</b>	<b>Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Pengawasan dan Pengendalian Bibit ternak dan HPT Pengendalian dan Pendistribusian Bibit ternak dan HPT</b>		<b>12 Kali 8 Kelompok</b>	<b>12 Kali 8 Kelompok</b>	<b>1,262,000,000</b>	<b>80,234,900</b>			<b>12 Kali 8 Kelompok</b>	<b>1,388,200,000</b>
6.2.1	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan Semua Kelurahan	100 Ekor	100 Ekor	820,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 Ekor	486,200,000

			Kab. Garu Semua Kecamata Semua Kelurahan Kab. Garu Tarogong Kidul, Mekargali Kab. Garu Banyuresm Banyuresm Kab. Garu Leles, Ciburial Kab. Garu Malangbo Sekarwan Kab. Garu Bayongbo Semua Kelurahan Kab. Garu Cigedug, Semua Kelurahan Kab. Garu Cilawu, Semua Kelurahan Kab. Garu Cisurupan Semua Kelurahan Kab. Garu Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garu Banjarwan Banjarwan								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6.2.2	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kab. Garu Semua Kecamata Semua Kelurahan	50 Ton	50 Ton	442,000,000	80,234,900	Dana Transfer Umum- Dana Alo kasi Umum		50 Ton	<b>19,888,00000</b> <b>0</b>
<b>6.3</b>	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>	<b>Jumlah kelompok yang mendapat fasilitasi pengadaan benih dan bibi ternak</b>		<b>50 Kelomp ok</b>	<b>50 Kelom pok</b>	<b>18,080,000,000</b>	<b>3,300,739,900</b>			<b>50 Kelompo k</b>	19,888,000,00 0
6.3.1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Kab. Garu Semua Kecamata Semua Kelurahan Kab. Garu Karangpa Karangmu Kab. Garu Karangpa Jatisari Kab. Garu Karangpa Godog Kab. Garu Karangpa Tanjungsa Kab. Garu Karangpa Situsaeur Kab. Garu Wanaraja, Wanamek Kab. Garu Tarogong Rancaban Kab. Garu Tarogong Pasawaha Kab. Garu Tarogong Kidul, Suk Kab. Garu	3088 Ekor	3088 Ekor	18,080,000,000	3,300,739,900	Dana Transfer Umum- Dana Alo kasi Umum		3088 Ekor	



			Tarogong Kidul, Mekargali Kab. Garu Banyuresm Sukakarya Kab. Garu Banyuresm Sukamukt Kab. Garu Banyuresm Sukalaksa Kab. Garu Leles, Cib Kab. Garu Kadungor Gandame Kab. Garu Kadungor Cikembula Kab. Garu Kadungor Mandalas Kab. Garu Kadungor Harumans Kab. Garu Malangbo Sukaratu								
<b>7</b>	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Prasarana yang dibangun/ dikembangkan</b>		<b>10 %</b>	<b>10 %</b>	<b>6,765,000,000</b>	<b>6,414,219,675</b>			<b>10 %</b>	
<b>7.1</b>	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Jumlah prasarana pertanian yang terbangun</b>		<b>8 Unit</b>	<b>8 Unit</b>	<b>3,565,000,000</b>	<b>2,785,052,700</b>			<b>8 Unit</b>	<b>9,251,603,700</b>

7.1.1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Kab. Garu Cigedug, Cigedug Kab. Garu Cigedug, Barusuda Kab. Garu Cigedug, Sukahurip Kab. Garu Cigedug, Sindangsa Kab. Garu Cigedug, Cintanaga Kab. Garu Sukaresm Sukamuly Kab. Garu Peundeuy Purwajaya	7 Unit	7 Unit	655,000,000	0	Dana Transfer Khusus Fisik	7 Unit	<b>9,251,603,700</b>
7.1.2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Garu Karangpa Situsaer Kab. Garu Kadungor Tanggulu Kab. Garu Sukaresm Sukajaya Kab. Garu Sukaresm Padamukt Kab. Garu Cibiuk, Lingkung	5 Unit	5 Unit	600,000,000	0		5 Unit	731,500,000

7.1.3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Garu Banjarwan Padahurip Kab. Garu Banjarwan Mulyajaya Kab. Garu Banjarwan Tanjungja Kab. Garu Cisompet, Panyindan Kab. Garu Cisompet, Neglasari Kab. Garu Mekarmuk Jayabaya	7 Unit	7 Unit	700,000,000	0	Dana Tran sfer Kh u su s- Dan a Alokasi Khusus Fisik	7 Unit	660,000,000
7.1.4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Garut, Wanaraja Semua Kelurahan Kab. Garut, Tarogong Kidul, Semua Kelurahan	2 Unit	2 Unit	800,000,000	94,949,000	Dana Transfer Umum- Dan a Alo kasi Umum	2 Unit	770,000,000
7.1.5	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Garu Wanaraja, Semua Kelurahan Kab. Garu Cilawu, Se Kelurahan Kab. Garu Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Cibalong, Semua	6 Unit	6 Unit	800,000,000	2,690,103,700	Dana Tran sfer Kh u su s- Dan a Alokasi Khusus Fisik	6 Unit	880,000,000

			Kelurahan Kab. Garu Selaawi, Semua Kelurahan								
7.2	<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Terbangunnya sentra pembibitan ternak		1 Lokasi	1 Lokasi	<b>3,200,000,000</b>	<b>3,629,166,975</b>			1 Lokasi	2,690,103,700
7.2.1	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Kab. Garu Sukaweni Sukaluyu	1 Laporan	1 Laporan	3,200,000,000	3,629,166,975	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	<b>3,520,000,000</b>
<b>VII</b>	<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Persentase penurunan jumlah kasus penyakit ternak</b>		<b>5,00 %</b>	<b>5,00 %</b>	<b>2,680,000,000</b>	<b>1,393,849,000</b>			<b>5,00 %</b>	3,520,000,000
<b>8.1</b>	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan sarana Prasarana Pelayanan Keswan</b>		<b>42 Kecamatan</b>	<b>42 Kecamatan</b>	<b>1,350,000,000</b>	<b>77,700,300</b>			<b>42 Kecamatan</b>	<b>2,948,000,000</b>
8.1.1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	150,000,000	78,400,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	<b>1,485,000,000</b>
8.1.2	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	1,200,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	165,000,000
<b>8.2</b>	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pengawasan Hewan dan Produk Asal hewan (PAH) dalam satu tahun</b>		<b>12 Kali</b>	<b>12 Kali</b>	<b>250,000,000</b>	<b>44,194,200</b>			<b>12 Kali</b>	1,320,000,000

8.2.1	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	150,000,000	44,194,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 Laporan	<b>275,000,000</b>
8.2.2	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	165,000,000
8.2.3	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	50,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	55,000,000
<b>8.3</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Peningkatan sarana Prasarana Pelayanan Keswan</b>		<b>5 unit</b>	<b>5 unit</b>	<b>830,000,000</b>	<b>1,010,161,500</b>			<b>5 unit</b>	55,000,000
8.3.1	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	230,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Laporan	<b>913,000,000</b>

8.3.2	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan Kab. Garu Wanaraja Semua Kelurahan Kab. Garu Cilawu, Se Kelurahan Kab. Garu Cikajang, Semua Kelurahan Kab. Garu Pameung Semua Kelurahan Kab. Garu Selaawi, Semua Kelurahan	12 laporan	12 Laporan	600,000,000	1,010,161,500			12 laporan	253,000,000
<b>8.4</b>	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>Pemeriksaan, pengawasan dan pendataan penyakit hewan dan keamanan produk hewan</b>		<b>12 Kali</b>	<b>12 Kali</b>	<b>250,000,000</b>	<b>261,793,000</b>			<b>12 Kali</b>	<b>660,000,000</b>
8.4.1	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 Laporan	12 Laporan	100,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alo kasi Umum		12 Laporan	110,000,000
8.4.2	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	4 Laporan	4 Laporan	150,000,000	261,793,000	Dana Transfer Umum-Dana Alo kasi Umum		4 Laporan	165,000,000

<b>IX</b>	<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Peningkatan pelayanan rekomendasi perizinan usaha peternakan</b>		<b>5 %</b>	<b>5 %</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>			<b>5 %</b>	<b>55,000,000</b>
<b>9.1</b>	<b>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Penerbitan Izin usaha Peternakan dan kesehatan hewan</b>		<b>12 laporan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>50,000,000</b>	<b>0</b>			<b>12 laporan</b>	<b>55,000,000</b>
9.1.1	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	11,000,000
9.1.2	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	12 laporan	12 laporan	40,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	44,000,000
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Peningkatan Bimbingan dan penyuluhan terhadap kelompok Peternak dan pelaku usaha peternakan</b>		<b>10 %</b>	<b>10 %</b>	<b>319,000,000</b>	<b>0</b>			<b>10 %</b>	<b>350,900,000</b>
<b>10.1</b>	<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Terlaksananya Penyuluhan terhadap Peternak dan pelaku usaha peternakan</b>		<b>12 Kali</b>	<b>12 Kali</b>	<b>319,000,000</b>	<b>0</b>			<b>12 Kali</b>	<b>110,000,000</b>
10.1.1	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Unit	2 Unit	100,000,000	0			2 Unit	165,000,000

10.1. 2	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Unit	2 Unit	150,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	75,900,000
9101 .3	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Garu Semua Kecamatan Semua Kelurahan	2 Unit	2 Unit	69,000,000	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	2 Unit	
						<b>29.734.000.000</b>	<b>30.446.735.629</b>			<b>65,883,303,700</b>

Sumber: Pengelolaan SIPD tahun 2023



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Catatan Penting dalam Penyusunan Renja**

Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain; kecermatan dalam pelaksanaan, kemampuan keuangan dan situasi yang mendukung. Dari ketiga faktor tersebut hal yang paling utama adalah faktor pelaksanaan karena menyangkut berlangsungnya sistem, regulasi dan sumber daya pelaksana. Faktor kecermatan pelaksanaan ini perlu pencermatan dan pengawasan lebih intensif agar pelaksanaan perubahan rencana kerja dapat berjalan sesuai yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rencana kerja ini akan berpegang pada aturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah dan aturan lainnya yang berlaku. Dengan berpegang pada aturan tersebut diharapkan dalam melaksanakan rencana kerja akan sesuai dengan norma aturan dan sistem yang berlaku. Pada akhirnya pelaksanaan rencana kerja dapat diterima baik dari sisi regulasi maupun sisi outcomes yang dihasilkan., catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan, maka Dinas Perikanan dan Peternakan akan mengambil kegiatan yang sangat prioritas dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan yang menunjang langsung pada peningkatan perekonomian peternak, pembudidaya ikan dan Nelayan dengan memperhatikan kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut.

#### **4.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.**

Rencana Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut Tahun 2023 merupakan acuan SKPD dalam mengimplementasikan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan selanjutnya, seluruh jajaran dalam organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Garut hendaknya mampu menerapkan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan setiap kegiatannya, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka pelaksanaan anggaran (*budget invention*).

#### **4.3. Rencana tindak lanjut**

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan SKPD.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN